

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan

1. Sejarah Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten pada tanggal 26 November 2008. Pembentukan daerah otonom baru tersebut, merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai kota Tangerang selatan ini dari berbagai sisi dibutuhkan dokumen yang memuat diantaranya gambaran umum perwilayahan, kependudukan, sosial budaya, ekonomi dan kelengkapan infrastruktur. Dengan adanya gambaran tersebut akan dapat diketahui permasalahan serta potensi yang dapat dikembangkan bagi pembangunan kota. Profil kota Tangerang selatan diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para pihak, termasuk Pemerintah Kota sendiri maupun masyarakat kota Tangerang Selatan dan para pakar pembangunan maupun para penanam modal dan calon penanam modal dalam pengambilan kebijakan atau keputusan lain.

2. Keadaan Geografis

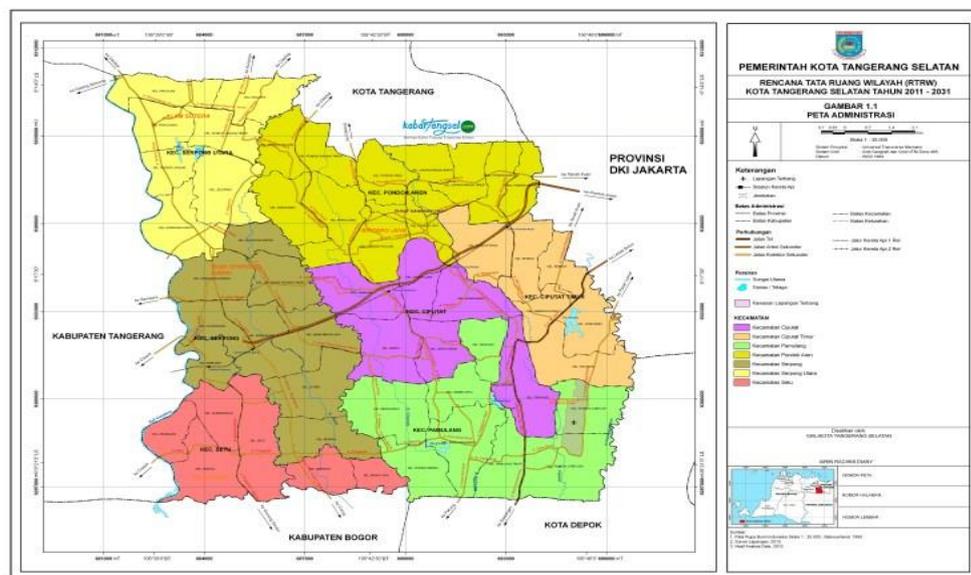
Kota Tangerang Selatan walaupun tergolong kota muda, tetapi sudah berkembang cukup pesat. Hal tersebut dikarenakan Kota Tangerang Selatan memiliki lokasi yang strategis, Kota Tangerang Selatan juga termasuk ke dalam Kawasan Kota Megapolitan yang berfungsi sebagai kota Penyangga dan kota penghubung Kota/Kabupaten di sekitarnya. Dari sisi geografis , Kota Tangerang Selatan berada pada kordinat 106'38' – 106'47 Bujur Timur

dan 06°13'30-06°22'30 Lintang Selatan dengan Batasan wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Bogor dan kota Depok
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang

Mengenai peta kota Tangerang selatan dapat dilihat pada gambar 4.1 yaitu sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kota Tangerang Selatan



Sumber: Website resmi pemerintah Kota Tangerang Selatan.

<https://www.tangerangselatankota.go.id/>

Atas perubahan luasan tersebut, Kota Tangerang Selatan menetapkannya kedalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011-2031. Apabila dilihat dari kecamatan terluas adalah kecamatan Pondok Aren dengan luas 2.979,88 ha atau 18,08%, sedangkan kecamatan dengan luas paling kecil adalah Setu dengan luas 1.675,75 ha atau 10,17%.

Deskripsi luas wilayah Kota Tangerang Selatan digambarkan pada table berikut:

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Luas Daerah	Presentase
1	Serpong	2.404	2.878,08	17,15%
2	Serpong Utara	1.782	2.236,24	13,56%
3	Ciputat	1.838	2.111,29	12,81%
4	Ciputat Timur	1.543	1.781,53	10,81%
5	Pamulang	2.682	2.873,70	17,43%
6	Pondok Aren	2.988	2.979,88	18,08%
7	Setu	1.480	1.675,75	10,17%
	Kota Tangerang Selatan	147,19	16.485,47	100%

Sumber : Revisi RTRW Kota Tangerang Selatan, 2011-2031

Wilayah kota Tangerang Selatan di antaranya dilintasi oleh Kali Angke, Kali Pesanggrahan dan Sungai Cisadane sebagai batas administrasi kota di sebelah barat. Letak geografis Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta pada sebelah utara dan timur memberikan peluang Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu kota strategis di sekitar ibukota Negara. Selain itu juga merupakan daerah yang memiliki posisi strategis dari sisi ekonomi karena menjadi daerah yang secara geografis yang menghubungkan wilayah Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat.

3. Demografi Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan berada di pulau Jawa, dan berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Berdasarkan data dari Sensus Penduduk Indonesia pada tahun 2020, per bulan September 2020, penduduk kota ini sebanyak 1.354.350 jiwa, dimana laki-laki sebanyak 678.159 jiwa dan perempuan sebanyak 676.191 jiwa pada tahun. Kota Tangerang Selatan ini termasuk sebagai salah satu kota industri, sehingga banyak penduduk dari luar provinsi banten yang bekerja dan menetap di Tangerang Selatan.

Hal ini juga mempengaruhi keberagaman penduduk kota ini, baik dari segi suku bangsa maupun agama yang dianut. Jika pada masa penjajahan Belanda, Tangerang Selatan didominasi oleh tiga suku, yaitu Betawi, Sunda dan Tionghoa, maka saat ini penduduknya lebih beragam.

B. Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan

DPAD Tangerang selatan awalnya terpisah antara Lembaga Perpustakaan dan Kearsipan dan masih berupa kantor. Kemudian Kantor Perpustakaan Daerah (Perpusda) Tangerang selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, yang pada awal pembentukan Kantor Arsip Daerah (KAD) pada tanggal 03 februari 2010 dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, yang berlokasi di Jl. Raya Siliwangi Kecamatan Pamulang Ruko Graha Mitra Tangerang Selatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SOTK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan. SOTK dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tupoksi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan.

1) Lokasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan ini bertempat di Jl. Ciater Raya, Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310. Lokasi tersebut terbilang cukup strategis karena berada di dalam wilayah pusat kantor pemerintahan sehingga banyak organisasi di pemerintahan daerah lain yang berlokasi di daerah tersebut. Dan dapat

memudahkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan untuk melakukan suatu koordinasi dengan dinas lainnya.

2) **Tugas, Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas perpustakaan dan kearsipan Kota Tangerang Selatan memiliki tugas pokok yaitu Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan arsip daerah. Sementara untuk fungsi Dinas perpustakaan dan kearsipan kota Tangerang selatan ini diselenggarakan oleh kepala dinas sebagai berikut:

- a) Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang Pelayanan Perpustakaan dan Arsip, Bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
- b) Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran di Bidang pelayanan perpustakaan dan arsipm bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
- c) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan.
- d) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksana tugas di lingkup Dinas
- e) Pelaksanaan peningkatan minat budaya baca masyarakat di daerah melalui gemar membaca
- f) Pelaksanaan pembinaan perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus meliputi perangkat daerah, kelurahan, unit kerja vertical, swasta
- g) Pelaksanaan pengelolaan dan penilaian arsip dinamis dan arsip statis yang di ciptakan oleh pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan tingkat daerah, organisasi politik tingkat daerah

- h) Pelaksanaan pemusnahan arsip dilingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi dibawah 10 tahun
- i) Pelaksanaan perlindungan, pemeliharaan, penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala daerah
- j) Pelayanan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh Lembaga kearsipan daerah
- k) Pelayanan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi wewenang daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip
- l) Pelayanan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga kearsipan daerah
- m) Pelaksanaan kerjasama di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
- n) Penyelenggaraan evaluasi, pelaporan tugas, dan fungsi lingkup Dinas
- o) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Adanya pelaksanaan tugas, untuk mendukung hal tersebut dinas perpustakaan dan kearsipan kota Tangerang Selatan berpegang mengacu pada visi Daerah Kota Tangerang Selatan yaitu “Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan Inovasi”. Visi daerah tersebut diacu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan untuk merumuskan dasar visi dinas perpustakaan yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Tangerang Selatan Unggul Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisin”.

Untuk mewujudkan visi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan memiliki misi sebagai berikut:

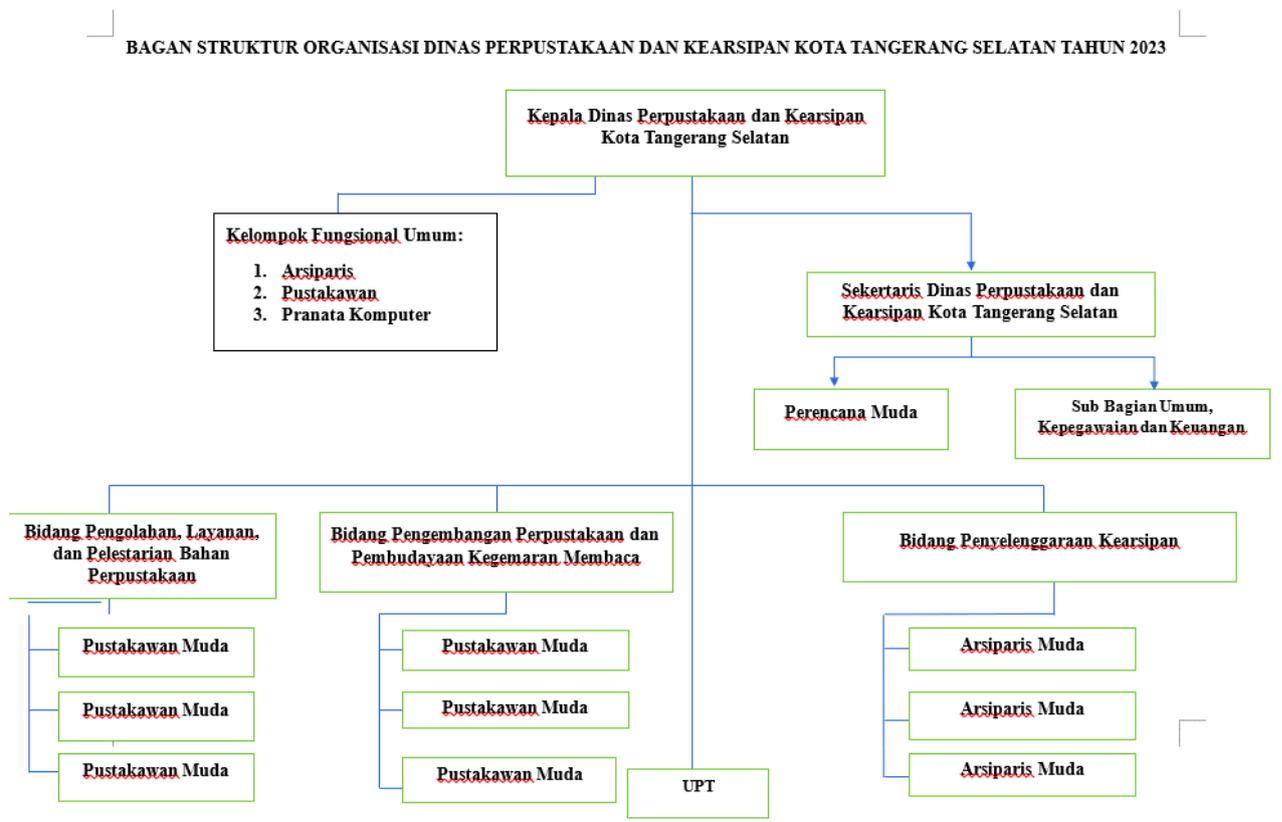
- a) Pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul
- b) Pembangunan Infrastruktur yang saling terkoneksi
- c) Membangun Kota lestari
- d) Meningkatkan Ekonomi berbasis nilai tambah tinggi di sector ekonomu kreatif

e) Membangun birokrasi yang efektif dan efisien

3) Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan

Struktur organisasi memiliki fungsi sebagai koordinasi antar bidang. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan memiliki struktur dan setiap struktur terdapat bidang yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Bidang sendiri memiliki fungsi untuk mengelola permasalahan mengenai perpustakaan dan kearsipan yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Gambar 4. 2 Struktur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan



Sumber: Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2022

Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat

- c. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
- d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
- e. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

4) **Tugas Pokok dan Fungsi**

a. **Kepala Dinas**

Kepala dinas memiliki tugas yaitu untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengolahan, layanan, dan pelestarian bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca serta penyelenggaraan kearsipan.

b. **Sekretaris Dinas**

Sekretaris dinas memiliki tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan dan umum serta mengoordinasikan pelaksanaan administrasi di lingkup dinas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsinya yaitu sebagai berikut :

- a) Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria di lingkup sekretariat dan Dinas.
- b) Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup Dinas
- c) Pelaksanaan penyusunan dan Analisa dokumen perencanaan serta manajemen resiko program anggaran di lingkup sekretarian dan Dinas
- d) Pengoordinasian penelitian/ asistensi/ pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal
- e) Pengoordinasian penyusunan, dokumen pelaporan kinerja kerja program dan kegiatan serta pertanggungjawaban [emerintah

Laporan Kinerja Pemerinta Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban di Lingkup Dinas.

- f) Pengoordinasian, Penyusunan, Perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
- g) Dan lain-lain

Sekretaris Dinas ini membawahkan:

- a) Subbagian Perencanaan
 - b) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- c. **Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan**

Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan memiliki tugas yaitu untuk melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional pengembangan koleksi bahan perpustakaan serta layanan, otomasi dan kerja sama perpustakaan. Bidang ini memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu :

- a) Perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup bidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan.
- b) Perencanaan dan pelaksanaan program anggaran di lingkup bidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan
- c) Pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi daerah (*localcontent*), pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka, deskripsi bibliografi, klarifikasi penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi, dan pemasukan datang kepangkalan data.
- d) Dan lain-lain

Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan membawahkan:

- a) Seksi Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan
- b) Seksi Layanan, Otomasi dan Kerja Sama Perpustakaan
- c) Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan
- d. **Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca**

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca ini dipimpin oleh Kepala Bidang, Yang memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan serta pengembangan pembudayaan kegemaran membaca. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Kepala Bidang ini menyelenggarakan beberapa fungsi Sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
- b) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
- c) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan di lingkup Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- d) Dan lain-lain

Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca ini membawahkan yaitu:

- a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan
- b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
- c) Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca

C. Deskripsi Data

1. Deskripsi data penelitian

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil observasi penelitian. Dalam penelitian mengenai

Implementasi Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda Kota Tangerang Selatan ini, peneliti mencoba untuk mendapatkan data-data yang valid dan reliabel yang akan digunakan sebagai bahan atau suatu informasi dalam menjawab perumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Data-data yang didapatkan ini dari lapangan lebih banyak merupakan data atau informasi berupa hasil wawancara dengan informan penelitian yang kemudian peneliti Analisa dan peneliti deskripsikan. Adapun data-data lain berupa dokumen penelitian yang akan dijadikan sebagai data penunjang dalam menjawab rumusan penelitian. Data-data tersebut didapatkan dengan cara media wawancara, catatan lapangan dan wawancara mendalam yang telah dilakukan oleh informan.

Pencarian data ini peneliti melakukan secara observasi dimana peneliti mengumpulkan data-data dengan cara melakukan wawancara yang mendalam kepada sejumlah informan yang memiliki informasi mengenai masalah yang sedang peneliti teliti ini. Data-data tersebut merupakan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian data-data yang sudah didapatkan di Analisa sehingga dapat menghasilkan suatu pemahaman baru dari data yang didapatkan. Beberapa bentuk data seperti dokumen-dokumen yang peneliti dapatkan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan merupakan data mentah yang harus diolah dan dianalisis Kembali untuk mendapatkan jawaban yang dibutuhkan.

Berikut untuk memperdalam analisis data, peneliti menggunakan dimensi penilaian yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Donald Van Metter Ven Horn. Teori tersebut memberikan gambaran atas strategis implementasi (Dalam Agustino, 2008:142) yaitu:

- a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- b) Sumber Daya
- c) Karakteristik agen pelaksana
- d) Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana
- e) Komunikasi antarorganisasi
- f) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Mengingat bahwa jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka data yang akan diperoleh berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, observasi, serta data atau hasil dokumentasi lainnya. Di dalam penelitian ini kata-kata dan Tindakan orang yang di wawancara merupakan sumber utama dalam penelitian. Sumber data ini kemudian oleh peneliti di catat dengan menggunakan catatan tertulis. Ada beberapa Langkah penting yang diperlukan dalam menganalisis data, diantaranya seperti koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Langkah pertama yang akan dilakukan yaitu pengumpulan data mentah baik melalui wawancara, observasi lapangan, kajian Pustaka, serta studi dokumentasi, tanpa adanya campur tangan dari pikiran peneliti atau dengan kata lain data yang bersifat apa adanya (*Verbatim*). Langkah kedua yaitu transkrip data yang dilakukan yaitu merubah catatan penelitian kebentuk tertulis.

Selanjutnya adalah kategorisasi data, yang dilakukan peneliti yaitu menyederhanakan data dan mengikat kata-kata kunci dalam suatu besaran yang disebut dengan kategori. Kemudian peneliti baru dapat mengambil kesimpulan meskipun bersifat sementara, sampai pada Langkah berikutnya peneliti melakukan proses *check and recheck* (triangulasi) diantara sumber data yang satu dengan sumber data lainnya. Langkah yang terakhir adalah penyimpulan akhir, dengan catatan bahwa data penelitian tersebut sudah jenuh dan disetiap penambahan data hanya akan memunculkan ketumpangtindihan.

2. Deskripsi Informan Penelitian

Pada penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda Di Kota Tangerang Selatan, peneliti menggunakan teknik *purposive* (tujuan), yaitu dengan dipilih pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami focus penelitian. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan, yaitu orang-orang peneliti yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini karena informan dalam

kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah informan yang dianggap memiliki sumber data atau informasi yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Beberapa informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Data Informan

No	Nama Informan	Jabatan Informan	Kode
1	H. Saripudin Prawirya, SE, MM	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan	I₁
2	Sadiyah, SE, M.Si	Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	I₂
3	Hadi luthfie Achfas, SH	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	I₃
4	Rima Rismayanti	Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan	I₄
5	Hilda Safitri	Pustakawan Ahli Pertama	I₄
6	Noka Maharany	Penyuluh Perpustakaan	I₄
7	Amel	Staff Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan	I₄
8	Dewi	Pengunjung perpustakaan	I₅
9	Amelia	Pengunjung perpustakaan	I₅
10	Roro	Pengunjung Perpustakaan	I₅

3. Deskripsi Hasil Penelitian

Pada hasil penelitian ini peneliti menggunakan teori Van Metter dan Van Horn dalam buku Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Agustino 2008:141), proses implementasi ini merupakan sebuah abstarski atau perfarmarsi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Dalam model ini mengandaikan bahwa

implementasi kebijakan ini berjalan secara linier dari keputusan politik yang telah tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu:

1. **Ukuran dan tujuan Kebijakan**

Suatu kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dari tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan kebijakan memang bersifat realistis dengan sosio kultur yang berbeda pada level pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan ini terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang untuk merealisasikan kebijakan public hingga ke titik yang dapat dikatakan berhasil.

Dari dimensi ukuran dan tujuan kebijakan ini, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung di dalamnya yaitu : Apa yang menjadi tujuan dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan ini dan bagaimana standar pelaksanaan kebijakan tersebut? peneliti bertanya kepada **Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan (I₁)** yang mengatakan bahwa tujuan dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 2 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dalam wawancara yang dikatakan oleh **I₁**:

“Tujuan dari Perda Kota Tangerang Selatan no 2 tahun 2016 itu adalah untuk memberikan dasar hukum dan penaduan dalam penyelenggaraan serta pengembangan perpustakaan di wilayah Kota Tangerang Selatan ini.” (Wawancara dengan Bapak H. Syarifudin pada hari selasa, 11 Juli 2023 pukul 09.05 WIB Di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Serupa dengan apa yang disampaikan oleh **I₁, Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I₂)** menjelaskan bahwa tujuan dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Pengembangan dan Penyelenggaraan Perpustakaan, yang nantinya

akan berdampak terhadap kinerja yang dihasilkan dari disiplin tersebut, berikut pernyataan yang disampaikan oleh I₂:

“Tujuan dari Perda Kota Tangerang Selatan no 2 Tahun 2016 itu untuk mengembangkan, dan meningkatkan budaya kegemaran membaca di kalangan masyarakat melalui akses dan fasilitas perpustakaan yang memadai. Kemudian juga perpustakaan berusaha menciptakan budaya literasi yang kuat di Kota Tangerang Selatan, dimana membaca dan belajar diperpustakaan akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat khususnya generasi muda.” (Wawancara dengan Ibu Sadiyah pada hari Selasa, 11 Juli 2023 Pukul 09.08 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Kemudian **Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I₂)** mengatakan bahwa standar dan keberhasilan dari Kebijakan ini sebagai mana yang dikatakan oleh I₂ yaitu:

“kalau untuk standarisasi dari pelaksanaan kebijakan ini sudah ada melalui SOP dan sudah di implementasikan, namun kebijakannya belum ada atau sedang disusun.” (Wawancara dengan Ibu Sadiyah pada hari Selasa, 11 Juli 2023 pukul 09.08 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Sementara Berdasarkan pernyataan di atas bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan dalam standarisasi pelaksanaannya sudah di implementasikan hanya saja kebijakannya sedang di susun. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang menerima mengenai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan tetapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan ini masih menggunakan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan perpustakaan yang isinya sama yaitu memiliki tujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan budaya kegemaran membaca di masyarakat khususnya generasi muda.

Program-program yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan untuk standarisasi dalam meningkatkan tingkat literasi dikalangan masyarakat khususnya generasi muda seperti di setiap sekolah harus mengadakan *field trip* ke

perpustakaan yang bertujuan untuk menanamkan kecintaan membaca kepada anak, PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak) bentuk program yang dibangun oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan menyediakan berbagai fitur layanan atau koleksi buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan anak agar dapat turut mendukung mereka dalam mengakses informasi yang ramah anak. Tujuan di bentuk PISA ini untuk menjamin layanan dan sebagai sumber wadah informasi yang tersedia di perpustakaan yang ramah bagi anak dan terintegrasi (sebagai tempat penyediaan informasi, tempat bermain, tempat peningkatkan kreatifitas, dan tempat konsultasi) yang sesuai kebutuhan anak. Selain dari program itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan bersama para stakeholder lainnya yaitu melakukan pengembangan perpustakaan ke kecamatan, kelurahan, dan TBM dengan memberikan koleksi buku, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, menanamkan budaya membaca kepada para generasi muda yang bertujuan untuk menanamkan kecintaannya terhadap buku bacaan.

Selain itu juga Dinas Perpustakaan juga menyediakan sarana berupa mobil yang digunakan untuk menyelenggarakan perpustakaan keliling yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat baca dikalangan masyarakat khususnya generasi muda untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan guna untuk mencerdaskan masyarakat, serta dengan ada perpustakaan keliling dapat menjangkau ke plosok-plosok daerah serta sekolah yang belum mempunyai perpustakaan dapat terbantu oleh adanya perpustakaan keliling tersebut.

Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I3) ini mengatakan bahwa tujuan dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan no 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan ini yaitu :

“untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat di daerah dan perlu ditumbuh kembangkan budaya gemar membaca ini melalui suatu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang memiliki fungsi sebagai sumber informasi. Dan yang penting sesuai dengan patokan yang dibuat dalam peraturan ini.” (Wawancara dengan Bapak Hadi Luthfie pada hari Selasa, 11 Juli 2023 pukul 09.12 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Kemudian **Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemeran Membaca (I₃)** mengatakan bahwa standar dan keberhasilan dari kebijakan ini sebagaimana yang dikatakan oleh I₃ adalah sebagai berikut:

“Untuk standar dan keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan ini itu hampir sama dengan yang dikatakan oleh Ibu Sadiyah tetapi ini lebih kedalam bentuk pengembangan dan pembudayaan kegemaran membaca untuk meningkatkan literasi ini biasanya kami melakukan pengembangan ke kecamatan, kelurahan, dan ke TBM seperti mengimplementasikannya berupa bahan bacaan dan juga sarana prasarana yang memadai.” (Wawancara dengan Bapak Hadi Luthfie pada hari Selasa, 11 Juli pukul 09.16 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa Selain dari program itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan bersama para stakeholder lainnya yaitu melakukan pengembangan perpustakaan ke kecamatan, kelurahan, dan TBM dengan memberikan koleksi buku, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, menanamkan budaya membaca kepada para generasi muda yang bertujuan untuk menanamkan kecintaannya terhadap buku bacaan.

Selain itu juga Dinas Perpustakaan juga menyediakan sarana berupa mobil yang digunakan untuk menyelenggarakan perpustakaan keliling yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat baca dikalangan masyarakat khususnya generasi muda untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan guna untuk mencerdaskan masyarakat, serta dengan ada perpustakaan keliling dapat menjangkau ke plosok-plosok daerah serta sekolah yang belum mempunyai perpustakaan dapat terbantu oleh adanya perpustakaan keliling tersebut.

Selain itu juga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan dalam melakukan standarisasi kebijakan juga mengimplementasikan perpustakaan berbasis teknologi informatika yang sudah di implementasikan berupa aplikasi *I-Tangsel* yang merupakan aplikasi perpustakaan berbasis digital yang bisa berjalan di sistem Operasi Android yang dilengkapi dengan fitur *e-Reader* untuk membaca ebuku-buku berbasis digital. Hal ini membuktikan bahwa upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan inovasi untuk merangsang minat baca di masyarakat umum khususnya generasi muda.

Diharapkan juga pengelolaan perpustakaan di Kota Tangerang Selatan ini menjadi lebih terorganisir, terarah, dan memiliki dampak positif bagi peningkatan literasi dan pengetahuan kepada seluruh masyarakat khususnya generasi muda yang akan menjadi aset masa depan bangsa. Serta sangat penting bahwa di setiap daerah atau kota dapat memiliki standar yang berbeda-beda tergantung dengan karakteristik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, standar pelaksanaan dari kebijakan yang terdapat dalam Perda no 2 Tahun 2016 ini juga harus disesuaikan dengan konteks dan situasi Kota Tangerang Selatan ini agar dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan dalam meningkatkan literasi serta pengetahuan dari para masyarakat.

Selanjutnya untuk pertanyaan terkait Bagaimana cara pelaksana yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan tersebut? Berdasarkan hasil wawancara dengan **Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca** selaku informan 3 (I3), menyatakan:

“Kalau untuk metode kita tidak ada semuanya mengacu ke dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan nomor 2 Tahun 2016 ini. Kalaupun metode itu harus ada caranya seperti pelayanan untuk mencapai penilaian yang baik ini ada standarisasinya seperti maklumat pelayanannya, kotak saran, dan sebagainya yang memiliki tujuan untuk mencapai pelayanan baik. Jadi terdapat banyak hal lainnya yang bisa

dikembangkan agar mencapai tujuan melalui perpustakaan ini.” (Wawancara dengan Bapak Hadi Luthfie pada hari Selasa, 11 Juli 2023 pukul 09.20 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa hal yang digunakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan Kebijakan Meningkatkan Literasi agar mencapai tujuan yang semuanya mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan nomor 2 Tahun 2016 agar mencapai suatu penilaian yang baik maka standarisasi dinas dalam bidang pelayanan dengan adanya maklumat pelayanan yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan serta informasi kepada masyarakat umum secara cepat, responsive, akurat dan akuntabel sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian terdapat kotak saran yang berfungsi untuk menampung kritik dan saran juga keluhan dari para pengunjung perpustakaan terkait dengan pelayanannya. Sedangkan untuk di pengembangan perpustakaan yang mengacu ke dalam Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial. Dimana Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial merupakan program yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional yang melibatkan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah desa, kelurahan untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat umum dalam menggunakan perpustakaan. Program ini bertujuan untuk antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Peran dan Fungsi Perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan
- c. Meningkatkan pemanfaatan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat

- d. Membangun komitmen dan dukungan pemangku kepentingan untuk transformasi perpustakaan berbasis inklusi social berkelanjutan
- e. Meningkatkan kemampuan literasi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan kegemaran membaca masyarakat dikalangan generasi muda.

Selain itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan selain memiliki program kegiatan datang ke perpustakaan hanya untuk membaca, meminjam buku, bermain, tetapi dinas perpustakaan juga memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi seperti pelatihan barista, memasak, dan pelatihan lainnya agar bisa mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Kemudian **Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I₃)** mengatakan cara pelaksana yang dilakukan dalam mencapai suatu tujuan tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh **I₂** ini adalah sebagai berikut:

“cara kami agar kebijakan ini mencapai tujuan dengan adanya standar perpustakaan keliling, dengan standar gerakan perpustakaan yang memiliki fungsi sebagai tempat membaca dan tempat untuk menerima informasi dengan berbagai macam koleksi bahan perpustakaan berupa bentuk buku dan e-book.” (Wawancara dengan Ibu Sadiyah pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 09.27 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan dalam mencapai tujuan kebijakan meningkatkan literasi serta mengoptimalkan layanan perpustakaan umum dan keberadaannya dapat dijangkau masyarakat umum maka diperlukan layanan perpustakaan keliling sebagai bentuk perpanjangan tangan layanan perpustakaan umum. Dengan adanya layanan perpustakaan keliling menjadi suatu kebutuhan penting dalam rangka peningkatan pengetahuan bagi masyarakat umum khususnya generasi muda dan meningkatkan minat baca masyarakat untuk menuju budaya baca dalam kerangka ikut serta mencerdaskan kehidupan

bangsa. Agar standar pelayanan perpustakaan keliling berjalan dengan lancar harus ada sarana dan prasarana yang memadai seperti berbagai macam koleksi buku bacaan, meja, kursi, dan lain sebagainya. Selain itu juga dengan adanya perpustakaan keliling ini dapat menjangkau hingga ke plosok-plosok dan sekolah yang tidak mempunyai perpustakaan.

Perpustakaan keliling ini memiliki beberapa program untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan menarik minat masyarakat umum khususnya generasi muda untuk datang ke perpustakaan keliling seperti kegiatan mendongeng atau bercerita, pemutaran film, promosi perpustakaan dan sebagainya agar mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan juga memiliki Standar Gerakan Perpustakaan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan ini memiliki standar untuk meningkatkan literasi kepada para masyarakat khususnya generasi muda dan berperan dalam mengembangkan perpustakaan tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara ini atas aspek mengenai Ukuran dan Tujuan Kebijakan adalah sebagai berikut:

Pertama, ini terdapat tujuan dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan Perpustakaan ini ialah merupakan sebuah sarana untuk pembelajaran dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun sebuah kepribadian melalui sebuah layanan perpustakaan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat umum. Dalam meningkatkan kecerdasan khususnya untuk para masyarakat umum di daerah itu perlu dikembangkan budaya gemar membaca ini melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai suatu sumber informasi. Selain sebagai sarana pembelajaran tujuan lain dalam Perda

ini adalah untuk meningkatkan budaya gemar membaca sejak dini dan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat dilakukan dalam rangka membuat masyarakat umum khususnya generasi muda ini agar gemar dalam membaca.

Kedua, untuk standarisasi dan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan ini tentang penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan ini yang utama adalah harus sesuai dengan isi yang terkandung di dalam Perda Kota Tangerang Selatan nomor 2 tahun 2016 dan di ikuti tahapan-tahap yang ada di dalam peraturan tersebut. Selain itu juga para pegawai menerapkan semua yang ada pada peraturan tersebut mulai dari melakukan penyelenggaraan, pengembangannya seperti apa dan menciptakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca di Kota Tangerang Selatan.

Ketiga, dilihat dari cara pelaksanaannya apakah sudah mencapai tujuan atau belum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan telah melakukan berbagai cara untuk melakukan pengembangan perpustakaan ini dengan cara mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan ini tidak hanya dijadikan sebagai tempat untuk membaca dan meminjam buku melainkan menjadi tempat sebagai pelatihan untuk generasi muda seperti pelatihan barista, memasak, dan sebagainya yang bermanfaat untuk generasi muda dan masyarakat umum karena akan menambahkan tingkat literasi di kota Tangerang selatan ini. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan ini berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan ini meskipun peraturan tersebut sedang dibuat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terkait dengan ukuran dan tujuan kebijakan para stakeholder sudah mengetahui tentang peningkatan literasi yang memiliki sasaran utama yaitu masyarakat umum khususnya generasi muda. Dari hasil pengamatan juga dapat diketahui bahwa ukuran yang menjadi suatu keberhasilan dari para

stakeholder dalam pengimplementasian kebijakan ini salah satunya dengan cara melakukan berbagai macam kegiatan dan program-program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan literasi.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang dilakukan dalam memenuhi indicator ukuran dan tujuan kebijakan ini sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini berdasarkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan dalam proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan politik sangat sulit diharapkan.

Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel ini telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh suatu tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia ini giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

Karena itu sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn merupakan ketiga bentuk sumber daya tersebut. Maka bila dilihat dari sumber daya yang dimaksud tersebut, dalam pelaksanaan Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda, ketiga bentuk sumber daya tersebut memang berpengaruh.

a) **Sumber Daya Manusia**

Pertama, Sumber daya Manusia, dalam halnya menjadi suatu pelaksana dari Kebijakan untuk meningkatkan literasi di kota Tangerang selatan ini adalah seluruh pegawai di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan. Dan peneliti bertanya siapakah yang menjadi implentator dalam kebijakan untuk meningkatkan Literasi di Kota Tangerang Selatan. Hal ini di sampaikan oleh **Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan (I₁)**:

“Yang menjadi Implementator dalam pembuatan kebijakan ini adalah seluruh stakeholder yang terlibat dalam pembuatan kebijakan ini.” (Wawancara dengan Bapak H. Syarifudin pada hari Selasa 11 Juli pukul 09.28 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Hal ini juga ditambahkan oleh **Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I₂)** yaitu:

“Yang menjadi implementator selain dari seluruh stakeholder yang berkaitan dalam pembuatan kebijakan ini dan ada juga dari staf tenaga ahli perpustakaan, masyarakat umum, pemerintah daerah, sector swasta komunitas-komunitas yang terlibat dalam pembuatan kebijakan ini.” (Wawancara dengan Ibu Sadiyah pada hari Selasa 11 juli 2023 pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan pernyataan diatas, dilihat bahwa yang menjadi implementator dalam pembuatan kebijakan meningkatkan literasi generasi muda di Tangerang Selatan tidak hanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan melainkan berbagai macam stakeholder, Pemerintah Daerah yang ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan ini. Kemudian terdapat sektor swasta yang ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota

Tangerang Selatan bekerjasama dengan sector swasta yaitu *PT. Nabors Drilling Technologies* yang merupakan perusahaan swasta tentang layanan penempatan lubang sumur canggih, perangkat lunak pengeboran, dan alat kinerja, peralatan pengeboran otomatis dan teknologi inovatif. Yang beralamatkan di Taman Tekno BSD Tangerang Selatan. Perusahaan tersebut bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan berupa membuat kegiatan atau program mengenai kursus Bahasa Inggris yang memiliki sasaran itu untuk kalangan para pelajar dari SMP, SMA, dan untuk yang terputus sekolah yang memiliki tujuan agar anak-anak yang mengikuti kegiatan ini bisa berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris dan mereka menjanjikan jika ada lulusannya ini bisa dipekerjakan.

Selain itu juga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan juga bekerja sama dengan para komunitas-komunitas seperti *magma (Masyarakat Gemar Membaca)*, komunitas komunitas mendongeng. Dan para komunitas tersebut sering datang ke perpustakaan untuk melakukan kegiatan seperti membawakan dongeng dan berbagai kegiatan lainnya untuk anak-anak yang memiliki tujuan agar anak-anak dan masyarakat umum khususnya generasi muda ini tertarik untuk datang ke perpustakaan dan membaca buku.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai bagaimana peran dan tugas dari masing-masing para stakeholder tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I₂)**, menyatakan sebagai berikut:

“Peranan dari kita ya? Ya dengan keyakinan dari kita bahwa kita ini akan berhasil dengan keyakinan itu. Kalau menurut saya ya tapi nanti dilihat lagi di Perda tersebut itu seperti apa? Karena kami juga berupaya dan berusaha bersama dengan masyarakat agar dapat mengimplementasikan Amanah yang ada di dalam Perda tersebut.” (Wawancara dengan Ibu Sadiyah pada hari Selasa 11 juli 2023 pukul 09.40 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa sumber daya yang ada di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan khususnya dalam bagian penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan sudah mencukupi dan para pegawai juga sudah sesuai dengan bidangnya dan tugasnya masing-masing. Serta implementator utama dalam pembuatan kebijakan ini adalah Pemerintahan Kota Tangerang selatan yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, termasuk dalam mengatur dan menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan perpustakaan. Selain dari pemerintah Daerah, partisipasi dan dukungan dari masyarakat, elit politik, dan tokoh masyarakat juga dapat menjadi implementator dalam kebijakan ini.

Seperti masyarakat khususnya generasi muda ini memiliki peran dalam aktif menggunakan fasilitas perpustakaan dan ikut berpartisipasi dalam program-program literasi. Sementara untuk elit politik, pihak swasta dan tokoh masyarakat mempunyai peran sebagai pembela dan dukungan dalam pengambilan suatu keputusan yang strategis serta promosi program-program terkait literasi di masyarakat khususnya generasi muda ini. Namun dengan sumber daya yang mencukupi dan memumpuni ini perlu ditetapkannya upaya untuk penguatan agar lebih sinkron.

Hal ini juga ditambahkan oleh beberapa **Staff Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan (I4)** yang mengatakan bahwa peranan masing-masing dari para stakeholder ini terkait dengan kebijakan ini sebagai berikut :

“Peranan dan tugas masing-masing itu jelas ada seperti pemerintah memiliki peran dan tugas sebagai pembuat kebijakan, kemudian pihak swasta dengan masyarakat itu memiliki peranan dan tugas untuk melaksanakannya kebijakan tersebut agar berjalan dengan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.” (Wawancara dengan Ibu Noka Maharany pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 09.43 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

“pemerintah memiliki tugas dan peran untuk membuat kebijakan dan program terkait literasi khususnya di Kota Tangerang Selatan. sehingga dapat bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat untuk mengembangkan literasi tersebut. pihak swasta sebagai mitra pemerintah yang bekerja sama terkait dengan program-program literasi.” (Wawancara dengan Ibu Amel pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 09.45 WIB di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Dari pernyataan diatas, yaitu dimana seluruh stakeholder dalam pengimplementasian kebijakan ini memiliki peranan masing-masing agar mendorong implementasi kebijakan ini berhasil melalui berbagai program yang di buat oleh para stakeholder. Karena proses keberhasilan dari implementasi kebijakan juga sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia, karena jika dilihat dari jumlah yang terlibat ini tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan maka dari itu para implementator juga membutuhkan dukungan dari masing-masing implementator agar bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan Kerjasama yang baik dan dukungan aktif dari berbagai pihak, diharapkan literasi di Kota Tangerang Selatan ini meningkat secara signifikan. Berkaitan dengan hal ini, Peneliti bertanya mengenai berapa besar dan sejauh mana dukungan dari para stakeholder dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I₂)**, mengatakan sebagai berikut:

“Dukungan dari para stakeholder sudah mulai banyak yaitu melalui APBD dengan cara memberikan sarana dan prasarana terus juga melalui SDM nya seperti adanya pembinaan dibagian penyuluhan dan sudah lumayan banyak yang sudah kita berikan kepada masyarakat seperti alat-alat yang ada di perpustakaan dan sarana prasarannya serta lainnya.” (Wawancara dengan Ibu Sadiyah pada hari Selasa 11 Juli 2023 Pukul 09.48 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Hal ini juga ditambahkan dari beberapa **Staff Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan (I₃)**,

mengatakan bahwa dukungan dari para stakeholder dalam pengimplementasian kebijakan ini yaitu:

“Stakeholder yang menudukung pengimplementasian kebijakan yang akan diaplikasikan ini berupa adanya berbagai macam program literasi seperti lomba-lomba, *storytelling*, serta pendirian di berbagai komunitas gemar membaca.” (Wawancara dengan Ibu Amel pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 09.51 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan dari pernyataan diatas mengenai dukungan dari para stakeholder dalam pengimplementasian ini sudah mulai banyak yang memberikan dukungan atas implementasi kebijakan ini dan banyak juga yang memberikan berbagai sarana dan prasaran agar dapat digunakan di perpustakaan dan pastinya juga terdapat beberapa program atau kegiatan yang berjalan seperti mengadakan lomba-lomba, *storytelling*, pelatihan memasak, pelatihan barista, kelas hidroponik melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) memiliki tujuan kegiatan yaitu dengan memperkenalkan metode hidroponik yang menarik untuk dipelajari bagi masyarakat umum yang ingin mengembangkan tanamannya dan membuka usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan oleh para stakeholder, komunitas, dan pihak swasta yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kegemaran membaca dilingkungan masyarakat umum khususnya untuk generasi muda ini.

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 07 sampai 11 Juli 2023, terhadap kinerja para pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan khususnya dalam penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan sudah mencukupi. Dari hasil pengamatan juga dapat diketahui bagaimana para kinerja pegawai dan stakeholder yang ada di dalam Dinas Perpustakaan melakukan aktivitas seperti mempersiapkan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan, kemudian melayani dan menyambut para pemustaka yang datang ke perpustakaan untuk membaca, meminjam buku, dan lainnya. Para

pegawai melakukan dengan baik mengenai bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan meningkatkan literasi kepada para pemustaka yang ada di perpustakaan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

b) Sumber Daya Anggaran

Sementara itu, terkait dengan sumber daya anggaran untuk kebijakan dalam meningkatkan literasi di kota Tangerang selatan berasal dari APBD. Seperti yang disampaikan oleh **Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I₃)** beliau mengatakan bahwa:

“Hampir keseluruhan anggaran berasal dari APBD. Kita setiap tahunnya ini menganggarkan untuk pengembangan dan pelayanan perpustakaan dan untuk anggaran yang disediakan itu relative gak bisa dipastikan berapa persennya, pokoknya relative.” (Wawancara dengan Bapak Hadi Luthfie pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 09.55 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Begitupun yang disampaikan oleh beberapa **Staff Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan:**

“Setiap tahun dianggarkan tetapi jumlahnya setiap tahun berbeda tergantung dengan kebijakan dan program yang diajukan.” (Wawancara dengan Ibu Noka Maharany pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 09.57 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

“Anggaran berbeda di setiap daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dimasing-masing daerah tersebut.” (Wawancara dengan Ibu Amel pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 09.59 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Berikut peneliti bertanya mengenai darimana saja anggaran yang disediakan dan apa ada anggaran yang berasal dari luar dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh **Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan (I₁):**

“Sumber anggaran ini berasal dari APBD, APBN dan Swasta. Dan kalau dari APBN, anggaran dari provinsi atau ada bantuan dari pemerintah swasta, tapi kalau untuk APBN itu ada alokasi khusus tapi

kita relative gak setiap tahun paling tidak setiap 5 tahun sekali itu juga kami harus melakukan pengajuan kalau tidak pengajuan kami hanya dapat dari APBD saja.” (Wawancara dengan Bapak H. Syarifudin pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.00 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Begitupun yang disampaikan oleh **Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan (I₂)**:

“Anggaran dari luar pemerintah itu ada. Ada juga anggaran yang dari kita sendiri kalau kita ingin mendonasikannya seperti kesukarelaan kita jika kita mempunyai lebih kita mendonasikannya untuk dimasukan ke anggaran.” (Wawancara dengan Ibu Sadiyah pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.05 WIB di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Serupa dengan I₂, **Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I₃)** mengatakan bahwa :

“Jadi sebetulnya anggaran itu semua berasal dari APBD nah bisa ke APBN kalau misalnya kita mengajukan dan bisa juga dari sector swasta seperti DISESA kalau kita mengajukan juga pasti akan diberi. Selama ini untuk mengajukan itu belum karena anggaran kita masih relative cukup sehingga kami juga masih mengandalkan anggaran dari APBD.” (Wawancara dengan bapak Hadi Luthfie pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.08 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara diatas, terlihat dari sumber daya anggaran dalam pelaksanaan kebijakan meningkatkan literasi di Kota Tangerang Selatan ini terbilang mencukupi. Karena Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan daerah ini melalui APBD. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan pendanaan perpustakaan ini didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan yang mengacu kepada Standar Nasional Perpustakaan dalam pengelolaan dana perpustakaan ini juga secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2023 mengenai sumber daya anggaran yang terdapat dalam Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan terbilang mencukupi. Karena dari hasil pengamatan dapat dilihat bahwa anggaran tersebut berasal dari APBD yang kemudian dialokasikan untuk digunakan sebagaimana mestinya terlihat dari fasilitas-fasilitas yang sudah memadai di perpustakaan dan program-program yang sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil dokumentasi yang dilakukan dalam memenuhi indikator sumber daya anggaran mengenai kebijakan ini Pemerintah Daerah sudah memberikan berbagai bantuan kepada perpustakaan untuk dikelola oleh masyarakat dan para stakeholder yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 tahun 2016 yang terdapat dalam pasal 25 dan pasal 26 tentang pendanaan.

c) **Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Sementara itu, terkait dengan sumber daya sarana dan prasarana, jika dilihat dari kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan ini mengenai tentang bagaimana kondisi dari masing-masing sarana prasarana, siapa yang merawat sarana dan prasarana serta sarana dan prasarana apa yang dimiliki dalam mendukung implementasi kebijakan ini. Sesuai dengan Pernyataan **Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I₂)** adalah sebagai berikut:

“Kalau untuk sarana dan prasarana yang kita miliki ya banyak seperti Gedung, komputer, rak buku, buku bacaan, meja, kursi dan lain-lain. Bahkan ada mobil yang digunakan sebagai perpustakaan keliling yang memiliki tujuan untuk meningkatkan literasi ini.” (Wawancara dengan Ibu Sadiyah pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.10 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Begitupun yang disampaikan oleh **Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I₃)** mengenai bagaimana kondisi dari masing-masing sarana dan prasarana ini apakah masih layak atau tidak.

“untuk kondisi sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan ini masih layak untuk digunakan.” (Wawancara dengan Bapak Hadi Luthfie pada

hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.12 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Hal serupa juga ditambahkan oleh **Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I₂)**. Beliau mengatakan bahwa:

“Kondisi dari sarana prasarana ini masih layak untuk digunakan, kalau tidak layak itu seperti rak-rak buku yang sudah agak reot itu akan kita singkirkan untuk kita perbaiki dan kita akan memberikan kepada yang membutuhkan seperti ke tbn-tbn jadi gak kitab uang begitu saja. Selagi masih bisa gunakan dan masih kita perbaiki kita manfaatkan lagi.” (wawancara dengan Ibu Sadiyah pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.14 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Begitu pula dengan perawatan dari sarana dan prasarana serta siapa yang bertanggung jawab dalam menjaga sarana dan prasarana ini, seperti yang disampaikan oleh **Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I₂)**, mengatakan bahwa:

“Yang bertanggung jawab yaitu seluruh pegawai yang bekerja di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan, para pustakawan, termasuk juga para pengunjung semuanya harus bertanggung jawab dalam menjaga sarana dan prasarana.” (wawancara dengan Ibu Sadiyah pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.16 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara diatas mengenai sumber daya sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan untuk mendukung berjalannya suatu kebijakan ini memiliki sarana dan prasarana yang layak untuk digunakan.

Gambar 4. 2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan pada tanggal 11 Juli 2023.

Gambar diatas merupakan fasilitas yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan. Bahkan jika sudah agak usang dan masih bisa di perbaiki akan disumbangkan kepada perpustakaan dan TBM yang masih kurang sarana dan prasaran ini. Begitu pula dengan para pegawai dan masyarakat yang ikut membantu merawat sarana dan prasaran ini supaya tidak cepat rusak.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada 11 Juli 2023 terkait dengan sumber daya sarana dan prasaran ini sudah dijalankan dengan baik. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan memiliki saran dan prasarana yang memadai untuk mendukung peningkatan literasi seperti tersedianya rak buku, koleksi buku bacaan, komputer, meja, kursi dan mobil yang digunakan dalam penyelenggaraan perpustakaan keliling.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada dimensi sumber daya diatas, terlihat dimana sumber daya manusia yang ada didalam implementasi kebijakan meningkatka literasi generasi muda di kota Tangerang selatan ini sudah mencukupi dan para stakeholder ini sudah sesuai dalam menjalankan tugas dan peran yang berada dalam bidangnya masing-masing. Serta melakukan kegiatan sosialisasi secara merata keseluruhan kota Tangerang Selatan agar menumbuhkan budaya gemar

membaca kepada masyarakat umum khususnya generasi muda. Seperti yang terkait pada Dinas Perpustakaan ini mengenai sumber anggaran atau pendanaan ini Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan daerah ini melalui APBD.

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan pendanaan perpustakaan ini didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan yang mengacu kepada Standar Nasional Perpustakaan, dalam pengelolaan dana perpustakaan ini juga dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab. Dan juga untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam meningkatkan literasi ini juga masih layak untuk digunakan untuk masyarakat umum khususnya untuk generasi muda. Bahwa untuk mendukung meningkatnya budaya membaca ini maka factor lingkungan juga mesti menjadi sebuah pertimbangan yang penting. Oleh karenanya lingkungan membaca harus lebih digalakkan dengan cara menyediakan akses bacaan masyarakat yang sesuai dengan kesukaannya seperti novel, buku dengan tema apa saja yang didistribusi kepada perpustakaan/ TBM setempat dengan sebuah format baca yang tercetak.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana ini meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (*public*) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan *public* yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindak laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarateristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

Dapat dilihat dari pengertian diatas ini bahwa untuk mewujudkan suatu kota atau kabupaten yang layak untuk meningkatkan literasi khususnya untuk generasi muda ini bukanlah hal yang mudah karena semua aspek ini harus terlibat. Berikut peneliti bertanya mengenai dari unsur mana saja yang menjadikan pelaksana dalam program-program peningkatan literasi ini. Hal ini disampaikan oleh **Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I₂)** Sebagai berikut:

“Unsur-unsurnya terdiri dari sekolah dan masyarakat pada umumnya.” (wawancara dengan Ibu Sadiyah pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.12 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Hal itu pun ditambahkan oleh **Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I₃)**, yang mengatakan bahwa unsur yang menjadi pelaksana dalam mengembangkan program-program peningkatan literasi ini yaitu:

“Semua unsur, termasuk para pegawai, pemerintah, masyarakat umum, sekolah-sekolah, dan pihak swasta, terlibat dalam pelaksanaan program-program terkait peningkatan literasi.” (Wawancara dengan Bapak Hadi Luthie pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.15 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I2) dan Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I3), dapat diidentifikasi bahwa unsur-unsur yang menjadi pelaksana dalam program-program peningkatan literasi ini mencakup beberapa pihak, yaitu:

1. Sekolah:

Sekolah memiliki peran penting dalam pelaksanaan program-program peningkatan literasi. Mereka dapat melibatkan siswa dalam kegiatan membaca dan menulis, mengadakan kegiatan-kegiatan literasi di dalam dan di luar kurikulum, serta menyediakan fasilitas yang mendukung literasi seperti perpustakaan.

2. Masyarakat Umum:

Masyarakat umum juga merupakan unsur yang berperan dalam program-program peningkatan literasi. Masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung literasi, seperti dengan mengadakan kegiatan membaca bersama, mengorganisir kelompok diskusi buku, dan mendukung kegiatan literasi di komunitas.

3. Para Pegawai:

Peran para pegawai atau staf dalam institusi dan organisasi terkait juga turut mendukung pelaksanaan program-program literasi. Mereka dapat berkontribusi dalam menyusun dan melaksanakan program-program tersebut.

4. Pemerintah:

Pemerintah berperan penting dalam memberikan dukungan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung program-program peningkatan literasi. Pemerintah dapat menyediakan dana, sumber daya, dan regulasi yang diperlukan untuk meningkatkan literasi di masyarakat dan pendidikan.

5. Pihak Swasta:

Selain pemerintah, pihak swasta juga dapat berperan dalam mendukung program-program literasi. Pihak swasta dapat memberikan dukungan

finansial, menyumbangkan buku-buku, atau menjalin kemitraan dengan lembaga literasi.

Dengan melibatkan berbagai unsur tersebut, diharapkan program-program peningkatan literasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan mencapai tujuannya untuk meningkatkan minat baca dan kecakapan literasi di masyarakat. Membuat Kerjasama dan keterlibatan dari berbagai unsur ini akan memberikan dampak yang lebih positif dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan program peningkatan literasi ini.

Pola hubungan antar agen pelaksana atau stakeholder yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan ini apakah berjalan dengan baik atau tidak. Seperti pernyataan dari **Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Memabaca (I₃)** Sebagai berikut:

“Kami dan para stakeholder memiliki hubungan baik dalam pembuatan kebijakan ini. Intinya, komunikasi yang baik menjadi kunci agar implementasi kebijakan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.” (Wawancara dengan Bapak Hadi Luthfie pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.17 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai siapakah yang menjadi sasaran utama dalam pengimplementasian kebijakan ini. Seperti pernyataan dari **Pustakawan (I₄)** Sebagai berikut:

“Sasaran utama dalam implementasi ini adalah kelompok masyarakat umum, sekolah, dan generasi muda dengan tingkat penasaran yang tinggi terkait literasi.” (Wawancara dengan ibu Rima pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.19 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Hal ini juga ditambahkan oleh **Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I₂)**, yang mengatakan bahwa sasaran utama dalam kebijakan ini adalah:

“Banyak santri dari pesantren yang rajin datang ke perpustakaan untuk membaca, mencari informasi, dan menggunakan fasilitas komputer, sehingga merasa nyaman dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Selain itu, banyak anak-anak juga sering datang untuk bermain, membaca buku, dan menikmati berbagai fasilitas lainnya di perpustakaan.” (Wawancara dengan Ibu Sadiyah pada hari Selasa 11

Juli 2023 pukul 10.22 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Analisis dari pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan beberapa poin penting terkait dengan pentingnya kerjasama dan keterlibatan berbagai unsur dalam program peningkatan literasi serta pola hubungan antar stakeholder yang baik untuk mencapai tujuan kebijakan dengan dampak positif dan berkelanjutan.

1. Kerjasama dan Keterlibatan Berbagai Unsur:

Menggendeng berbagai unsur seperti sekolah, masyarakat umum, para pegawai, pemerintah, dan pihak swasta dalam program peningkatan literasi adalah langkah yang sangat tepat. Setiap unsur memiliki peran dan kontribusi yang unik dalam upaya meningkatkan literasi. Keterlibatan berbagai pihak juga membawa beragam perspektif dan sumber daya yang dapat digabungkan untuk menciptakan program literasi yang lebih komprehensif dan efektif.

2. Dampak Positif dan Berkelanjutan:

Dengan melibatkan berbagai pihak, program-program peningkatan literasi memiliki potensi untuk mencapai dampak yang lebih positif dan berkelanjutan. Kerjasama yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, sehingga upaya literasi dapat mencapai hasil yang lebih signifikan dan berlanjut dalam jangka waktu yang lebih lama.

3. Pola Hubungan Antar Stakeholder:

Pernyataan dari Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I3) menekankan pentingnya pola hubungan yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Komunikasi yang lancar dan kerjasama yang harmonis antara stakeholder merupakan faktor kunci dalam menjalankan kebijakan dengan baik dan sesuai tujuan. Dengan demikian, kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan memberikan hasil yang diharapkan.

4. Sasaran Utama Implementasi Kebijakan:

Pernyataan dari Pustakawan (I4) dan Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I2) menunjukkan bahwa sasaran utama dari implementasi kebijakan peningkatan literasi adalah kelompok masyarakat umum, sekolah, dan generasi muda yang memiliki tingkat penasarannya tinggi terkait literasi. Selain itu, pesantren juga menjadi sasaran utama karena adanya kunjungan santri untuk membaca dan mencari informasi di perpustakaan serta adanya anak-anak yang datang untuk bermain dan membaca buku. Sasaran ini mencakup berbagai kelompok yang berperan dalam meningkatkan minat baca dan literasi di masyarakat.

Dari hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa kerjasama dan keterlibatan berbagai unsur serta pola hubungan yang baik antar stakeholder merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan program peningkatan literasi. Sasaran utama dari implementasi kebijakan ini mencakup berbagai kelompok, termasuk masyarakat umum, sekolah, generasi muda, santri, dan anak-anak. Dengan melibatkan berbagai pihak dan fokus pada sasaran yang tepat, program peningkatan literasi memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai dampak yang positif dan berkelanjutan dalam mengatasi tantangan literasi di masyarakat.

Hasil analisis dari observasi dan dokumentasi terhadap pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan pentingnya melibatkan berbagai unsur atau stakeholder dalam program-program peningkatan literasi. Beberapa poin penting yang dapat diidentifikasi dari analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran Berbagai Unsur/Stakeholder:

Peningkatan literasi merupakan tugas bersama dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Pernyataan dari Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I2) dan Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I3) menunjukkan bahwa program peningkatan literasi melibatkan sekolah,

masyarakat umum, para pegawai, pemerintah, dan pihak swasta. Dengan melibatkan berbagai unsur ini, upaya literasi menjadi lebih komprehensif dan dapat menjangkau lebih banyak kalangan.

2. Karakteristik Agen Pelaksana:

Implementasi kebijakan publik dalam peningkatan literasi memerlukan agen pelaksana yang sesuai dengan ciri-ciri atau karakteristik yang dibutuhkan. Ketika kebijakan bertujuan untuk mengubah perilaku secara radikal, agen pelaksana harus memiliki karakteristik yang keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Namun, jika kebijakan berfokus pada perubahan perilaku dasar manusia, agen pelaksana yang diturunkan bisa lebih fleksibel dan tidak setegas pada situasi pertama.

3. Dukungan dan Hubungan yang Baik antar Stakeholder:

Pola hubungan antar stakeholder atau berbagai pihak yang terlibat dalam program peningkatan literasi harus berjalan dengan baik. Pernyataan dari Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I3) menekankan pentingnya komunikasi yang baik agar implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan. Dukungan dan kerjasama dari berbagai stakeholder sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program.

4. Sasaran Utama Implementasi Kebijakan:

Sasaran utama dalam implementasi kebijakan peningkatan literasi meliputi kelompok masyarakat umum, sekolah, generasi muda dengan tingkat penasarannya tinggi terhadap literasi, serta pesantren yang merupakan tempat kunjungan santri untuk membaca dan mencari informasi. Sasaran ini mencakup berbagai kelompok yang berperan dalam meningkatkan minat baca dan literasi di masyarakat.

5. Pentingnya Dampak Positif dan Berkelanjutan:

Melibatkan berbagai unsur/stakeholder dalam program peningkatan literasi dengan kerjasama dan komunikasi yang baik dapat menciptakan dampak yang lebih positif dan berkelanjutan. Peningkatan literasi yang

berhasil akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat, sekolah, dan generasi muda.

Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pentingnya kerjasama dan keterlibatan berbagai unsur/stakeholder dalam program peningkatan literasi untuk mencapai dampak yang positif dan berkelanjutan. Pola hubungan yang baik antar stakeholder, komunikasi yang lancar, dan dukungan dari berbagai pihak akan memberikan kontribusi besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan literasi. Sasaran utama implementasi kebijakan meliputi kelompok masyarakat umum, sekolah, generasi muda, dan pesantren, yang akan menjadi fokus dalam upaya meningkatkan minat baca dan literasi di masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada 10 s/d 11 juli 2023 terhadap karakteristik para pegawai yang berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan ini sudah berada di level cukup. Karena dari hasil pengamatan aktivitas yang dilakukan para pegawai dan dinas untuk mengembangkan perpustakaan dan meningkatkan literasi ini memiliki komunikasi yang baik dengan semua unsur yang terlibat dalam pembuatan kebijakan ini. Dan Dinas Perpustakaan juga melakukan kampanye dengan para stakeholder yang memiliki tujuan untuk membangun budaya literasi ini melalui media massa dan media sosial.

4. Sikap dan Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementator laksanakan ini adalah kebijakan “dari atas” (*Top Down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak

mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Sikap penerimaan dalam Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda ditunjukkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan ikut membangun komitmen nasional tersebut. Dimulai dari bagaimana komitmen dari para stakeholder dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Terkait hal itu, **Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I₂)** beliau mengatakan bahwa:

“Mereka berkomitmen untuk mendukung kegiatan ini, baik dari pemerintah daerah maupun para stakeholder dengan peran sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.” (Wawancara dengan Ibu Sadiyah pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.20 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Begitupun yang dikatakan oleh **Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I₃)** mengatakan bahwa:

“Komitmen mereka adalah mendukung dan mensupport pengembangan peningkatan literasi sesuai dengan tujuan yang telah dirancang dalam Perda.” (Wawancara dengan Bapak Hadi Luthfie pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.22 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Hasil analisis dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dan komitmen para stakeholder dalam Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda di Pemerintah Kota Tangerang Selatan terlihat positif. Beberapa poin yang dapat diidentifikasi dari pernyataan para kepala bidang adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dan Para Stakeholder Berkomitmen:

Kedua kepala bidang menegaskan bahwa pemerintah daerah dan para stakeholder yang terlibat memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung kebijakan untuk meningkatkan literasi generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mendapatkan dukungan yang signifikan dari berbagai pihak terkait.

2. Sinergi Dalam Mendukung Kebijakan:

Para stakeholder sepakat untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendukung kegiatan literasi ini. Terlihat bahwa setiap pihak mengakui dan memahami peran serta tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Ini adalah aspek penting dalam mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang ada.

3. Dukungan Pengembangan dan Peningkatan Literasi:

Para kepala bidang menekankan bahwa komitmen mereka bukan hanya sebatas dukungan atas kegiatan literasi yang sudah berjalan, tetapi juga mencakup dukungan dalam pengembangan dan peningkatan literasi sesuai dengan tujuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) terkait. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berfokus pada upaya untuk meningkatkan efektivitas dan dampak dari kebijakan tersebut.

4. Keterlibatan Para Stakeholder:

Meskipun pernyataan hanya mencantumkan dua kepala bidang, tetapi terlihat bahwa kebijakan literasi ini melibatkan berbagai pihak atau stakeholder lainnya yang juga berkomitmen mendukung dan berperan aktif dalam implementasi kebijakan tersebut.

Dari analisis ini, tampak bahwa kebijakan meningkatkan literasi generasi muda di Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki pondasi yang kuat berupa dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah dan para stakeholder terkait. Sinergi dan keterlibatan dari berbagai pihak ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan kebijakan dan berkontribusi pada peningkatan literasi di masyarakat.

Namun, belum adanya Peraturan Daerah yang khusus membahas tentang literasi ini, seperti yang disampaikan oleh **Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I₂)**. Beliau mengatakan bahwa:

“Meskipun belum ada Perda khusus untuk meningkatkan literasi, ada beberapa Perwal yang mendukung pelaksanaan kebijakan literasi. Saat ini, sudah ada SOP yang diimplementasikan, dan peraturan-peraturan masih dalam proses pembuatan.” (Wawancara dengan Ibu Sadiyah pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.24 WIB di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan wawancara tersebut, terlihat bahwa pemenuhan hak dalam menciptakan literasi ini belum tertuang kedalam Peraturan daerah, tapi lebih kepada bidangnya masing-masing. Selain itu, bagaimana tanggung jawab dari para staf atau pelaksana terhadap implementasi kebijakan ini. Seperti pernyataan dari para **Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan (I4)** sebagai berikut:

“Kebijakan ini akan berjalan dengan baik jika dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan bidang masing-masing.” (Wawancara dengan Ibu Hilda dan Ibu Noka pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.26 WIB di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Hasil analisis dari kutipan tersebut menunjukkan beberapa poin penting terkait situasi literasi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan:

1. Kekurangan Peraturan Daerah Khusus tentang Literasi:

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I2) menyatakan bahwa belum ada Peraturan Daerah (Perda) khusus yang secara eksplisit membahas tentang literasi. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur dan menyediakan landasan hukum yang jelas untuk upaya meningkatkan literasi di daerah tersebut.

2. Dukungan Melalui Produk Hukum:

Meskipun belum ada Perda khusus, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyatakan telah mengeluarkan beberapa Peraturan Walikota (Perwal) yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam kebijakan literasi. Ini menunjukkan adanya usaha untuk memberikan dukungan hukum dan kelembagaan terhadap upaya meningkatkan literasi, meskipun belum sekomprehensif Perda.

3. SOP dan Implementasi Peraturan:

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I2) juga menyatakan bahwa telah ada SOP (*Standard Operating Procedure*) dan langkah-langkah implementasi untuk kebijakan literasi, meskipun peraturan yang lebih komprehensif masih dalam proses pembuatan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mengarahkan implementasi kebijakan literasi secara terstruktur dan terorganisir.

4. Tanggung Jawab Para Staf Pelaksana:

Para staf dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan (I4) memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan literasi yang telah ditetapkan dengan baik dan sesuai dengan bidang masing-masing. Pernyataan ini menunjukkan kesadaran dan keterlibatan para pelaksana dalam menjalankan tugas mereka untuk mendukung keberhasilan kebijakan literasi.

Dari hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan literasi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan, namun masih terdapat kekurangan dalam bentuk regulasi yang khusus mengatur literasi. Walaupun demikian, terlihat adanya dukungan melalui produk hukum seperti Perwal dan usaha untuk mengarahkan implementasi melalui SOP. Tanggung jawab para staf pelaksana juga menjadi faktor penting dalam menjalankan kebijakan literasi ini dengan baik. Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasi kekurangan dalam regulasi dan memastikan pelaksanaan yang efektif untuk mencapai tujuan meningkatkan literasi generasi muda di daerah tersebut.

Disamping itu juga upaya untuk penguatan ini, ada bagaimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan ini dalam mendisposisikan atau menentukan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan nanti. Seperti pernyataan yang dilakukan oleh **Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I3)**, Mengatakan bahwa:

“Kami menentukan pelaksanaan kegiatan literasi dengan menggunakan DPA (Dukungan Pelaksanaan Anggaran) sebagai panduan. Setiap tahun, kami mengajukan DPA untuk melaksanakan program-program literasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, dengan tujuan penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.” (Wawancara dengan Bapak Hadi Luthfie pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.28 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Begitupun ditambahkan oleh beberapa **Staff Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan (I4)**, mengatakan bahwa dinas dalam mendisposisikan pelaksanaan kegiatan yaitu:

“Mendisposisikan tugas sesuai tupoksi dan kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai harapan.” (Wawancara dengan Ibu Noka pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.30 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Hasil analisis dari pernyataan Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I3) serta beberapa staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan (I4) tentang pendisposisian atau penentuan pelaksanaan kegiatan literasi adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan DPA (Dukungan Pelaksanaan Anggaran):

DPA digunakan sebagai alat untuk menentukan dan mengakomodasi pelaksanaan kegiatan literasi. DPA menjadi pedoman dalam mengajukan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan literasi setiap tahun. Dengan menggunakan DPA, dinas dapat merencanakan dengan lebih terstruktur dan mengalokasikan anggaran yang tepat untuk mendukung program literasi yang telah direncanakan.

2. Keterkaitan dengan Tupoksi dan Kebijakan:

Dalam pendisposisian kegiatan literasi, dinas mempertimbangkan keterkaitan dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dan kebijakan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan literasi yang dipilih dan dilaksanakan harus sesuai dengan mandat dan kebijakan resmi

dinas, sehingga tercapai kesesuaian antara program dengan tujuan institusi secara keseluruhan.

3. Efisiensi Penggunaan Anggaran:

Dengan mengacu pada DPA yang sudah dibuat dan anggaran yang telah ditetapkan, dinas berupaya untuk menggunakan anggaran secara efisien dan efektif dalam pelaksanaan kegiatan literasi. Ini menandakan komitmen untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada demi keberhasilan program-program literasi yang direncanakan.

4. Penjaminan Kelancaran Kebijakan:

Pendisposisian kegiatan literasi dengan memastikan kesesuaian dengan Tupoksi dan kebijakan yang berlaku bertujuan untuk menjamin kelancaran implementasi kebijakan. Dengan mengacu pada panduan dan peraturan yang telah ditetapkan, diharapkan kebijakan literasi dapat berjalan sesuai dengan harapan dan mencapai hasil yang diinginkan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan memiliki pendekatan yang terstruktur dan berorientasi pada pengelolaan sumber daya secara efisien dalam mendisposisikan dan menentukan pelaksanaan kegiatan literasi. Penggunaan DPA sebagai panduan anggaran, pengakuan terhadap Tupoksi dan kebijakan yang berlaku, serta fokus pada efisiensi anggaran merupakan langkah-langkah penting yang diambil oleh dinas untuk mencapai tujuan dan harapan dalam meningkatkan literasi di wilayah tersebut.

Selain itu terdapat sanksi atau penghargaan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan yang akan diberikan kepada para seluruh tenaga perpustakaan ini. Seperti pernyataan dari **Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I₃)** Berikut ini:

“Sanksi umumnya diberlakukan, seperti pemotongan honor atau surat teguran bagi pegawai yang datang terlambat, dan untuk kesalahan yang fatal, pegawai dapat dikeluarkan atau dipecat.” (Wawancara dengan Bapak Hadi Luthfie pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.33

WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Hal serupa juga dikatakan oleh **Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I2)**, mengatakan:

“Penghargaan diberikan secara umum, seperti memberi reward atau hadiah kepada pegawai yang teladan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.” (Wawancara dengan Ibu Sadiyah pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.35 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Hasil wawancara dari pernyataan Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I3) dan Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I2) tentang sanksi dan penghargaan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan terhadap para tenaga perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi untuk Menegakkan Disiplin:

Dalam upaya menegakkan disiplin dan meningkatkan kinerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan memberlakukan sanksi bagi pegawai yang melakukan kesalahan atau pelanggaran tertentu. Pernyataan dari Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I3) menyebutkan beberapa contoh sanksi, seperti pengurangan honor bagi pegawai yang datang terlambat, surat teguran untuk kesalahan tertentu, dan pemecatan atau pemberhentian jika terjadi kesalahan fatal. Hal ini menunjukkan bahwa dinas memiliki aturan dan mekanisme yang jelas untuk menghadapi pelanggaran atau kelalaian dari pegawai guna menjaga disiplin dan akuntabilitas.

2. Penghargaan sebagai Pengakuan dan Motivasi:

Selain sanksi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan juga memberikan penghargaan sebagai bentuk pengakuan dan motivasi bagi para pegawai yang menunjukkan kinerja teladan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penghargaan ini dapat berupa hadiah atau apapun bentuk pengakuan yang sesuai. Pendekatan ini bertujuan

untuk memberikan apresiasi atas kinerja yang baik dan menciptakan lingkungan kerja yang positif, yang diharapkan dapat meningkatkan semangat dan kualitas pelayanan dari para pegawai.

3. Penekanan pada Performa dan Etika Kerja:

Kebijakan sanksi dan penghargaan ini menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan memberikan penekanan pada performa dan etika kerja pegawai. Dengan memberikan konsekuensi atas tindakan yang tidak sesuai dengan etika kerja dan memberikan apresiasi atas kinerja yang baik, dinas berupaya menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan berorientasi pada kualitas pelayanan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, pendekatan sanksi dan penghargaan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan menunjukkan komitmen mereka untuk mendorong disiplin, akuntabilitas, dan kualitas kerja para tenaga perpustakaan. Sanksi digunakan sebagai langkah preventif dan korektif untuk menegakkan disiplin dan tindakan yang bertentangan dengan aturan, sementara penghargaan digunakan untuk memberikan apresiasi dan motivasi positif bagi kinerja yang baik. Kombinasi dari sanksi dan penghargaan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan dalam meningkatkan literasi dan pelayanan perpustakaan di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada 11 Juli 2023 terhadap sikap dan kecenderungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan sudah dijalankan dengan baik. Hal ini berdasarkan hasil pengamatan bahwa ketika para seluruh pegawai dan masyarakat umum yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang masing-masing tanpa melanggar aturan yang ada akan mendapatkan reward dan penghargaan. Begitupun sebaliknya jika melanggar akan mendapatkan sanksi berupa surat teguran hingga pemberhentian bekerja. Diharapkan kebijakan meningkatkan literasi generasi muda di Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat berjalan

dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam upaya memperkuat kebijakan literasi, penting untuk terus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan melibatkan berbagai pihak terkait guna menciptakan dampak yang positif bagi generasi muda dan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil dokumentasi dapat dilihat bahwa proses pelaksanaan dari para stakeholder dalam meningkatkan literasi serta Sanksi Administratif yang berlaku ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 yang terdapat dalam pasal 33 sampai dengan pasal 37 tentang sanksi administratif.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dalam pelaksanaan Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda di Kota Tangerang Selatan, sosialisasi merupakan peran penting dari setiap pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut. Karena Kebijakan Meningkatkan Literasi ini merupakan kebijakan yang dibuat dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota dengan melibatkan semua elemen mulai dari pemerintah setempat, pihak swasta, komunitas-komunitas dan masyarakat umum khususnya generasi muda ini.

Bila dilihat dari hal tersebut, sosialisasi dan koordinasi ini sangat dibutuhkan agar Kebijakan Meningkatkan Literasi ini dapat berjalan, ini semua agar tidak ada tumpang tindih tugas dari masing-masing stakeholder sehingga tugas pokok dan fungsi dari tiap stakeholder yang terkait harus mudah memahami. Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh **Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I3)** mengenai sosialisasi yang akan dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan sudah merata ke seluruh wilayah Tangerang Selatan khususnya wilayah ciputat, Beliau mengatakan bahwa:

“Setiap tahun, kami melakukan sosialisasi untuk meningkatkan literasi dengan mencakup seluruh kecamatan, kelurahan, sekolah-

sekolah, TK, dan Paud.” (Wawancara dengan Bapak Hadi Luthfie pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.35 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Hal serupa mengenai sosialisasi yang dilakukan Dinas dalam mengimplementasikan kebijakan ini berikut, pernyataan yang dikatakan oleh **Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I₂)** sebagai berikut:

“Sosialisasi dilakukan secara merata di Tangerang Selatan seriap tahun. Melalui I-Tangsel, masyarakat yang sulit datang ke perpustakaan bisa tetap membaca. Sosialisasi juga dilakukan di sekolah-sekolah dengan perpustakaan keliling. Tujuan adalah membina dan mengajak masyarakat terutama generasi muda, untuk gemar membaca. Sosialisasi ini penting agar masyarakat menyadari bahwa membaca adalah jembatan ilmu.” (Wawancara dengan Ibu Sadiyah pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.38 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa:

1. Pentingnya Sosialisasi dan Koordinasi:

Dalam pelaksanaan Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda di Kota Tangerang Selatan, sosialisasi menjadi peran penting dari setiap pihak yang terlibat. Hal ini diperlukan karena kebijakan literasi melibatkan berbagai elemen, termasuk pemerintah setempat, pihak swasta, komunitas, dan masyarakat umum, khususnya generasi muda. Dengan adanya sosialisasi dan koordinasi yang baik, diharapkan tidak ada tumpang tindih tugas dari masing-masing stakeholder, sehingga tugas pokok dan fungsi mereka dapat dipahami dengan jelas.

2. Tujuan Sosialisasi:

Sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi tentang Kebijakan Meningkatkan Literasi kepada seluruh masyarakat di wilayah Tangerang Selatan. Melalui sosialisasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan berupaya untuk menjangkau seluruh kecamatan, kelurahan, sekolah-sekolah, TK, dan PAUD agar pesan mengenai pentingnya literasi dapat disampaikan secara merata dan menyeluruh.

3. Metode Sosialisasi:

Dalam melakukan sosialisasi, Dinas perpustakaan menggunakan berbagai metode dan cara untuk mencapai target audiens. Selain mengadakan sosialisasi secara langsung di berbagai tempat seperti perpustakaan dan sekolah, Dinas perpustakaan juga menggunakan teknologi digital, seperti platform "I-tangsel" untuk membantu mereka yang tidak memiliki waktu untuk datang ke perpustakaan atau tempat layanan literasi. Selain itu, kegiatan perpustakaan keliling juga menjadi salah satu metode untuk mencapai masyarakat yang berada di lokasi yang sulit dijangkau.

4. Pembinaan dan Ajakan untuk Membaca:

Selain sosialisasi, Dinas perpustakaan juga melakukan pembinaan dan ajakan kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda, untuk membaca. Membaca dianggap sebagai jembatan ilmu, dan penting untuk meningkatkan minat baca masyarakat agar dapat meningkatkan literasi secara keseluruhan.

5. Peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:

Dari pernyataan Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I3) dan Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I2), dapat terlihat bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan memiliki peran aktif dalam menyebarkan informasi tentang literasi dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan literasi. Sosialisasi dan upaya pembinaan ini merupakan wujud komitmen dari dinas untuk meningkatkan literasi di wilayahnya.

Secara keseluruhan, hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi dan koordinasi merupakan elemen kunci dalam keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda di Kota Tangerang Selatan. Melalui sosialisasi yang merata dan berbagai metode yang digunakan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berusaha mencapai seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, untuk meningkatkan minat baca dan kesadaran akan pentingnya literasi. Hal

ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang literat dan mendukung perkembangan pengetahuan dan pembelajaran di masyarakat.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi. Dan begitu pula sebaliknya. Dalam pelaksanaan Kebijakan Meningkatkan Generasi Muda di Kota Tangerang Selatan, koordinasi ini memiliki peran yang penting dari setiap pihak dengan kebijakan tersebut. Bila dilihat dari hal tersebut, jelas koordinasi sangat dibutuhkan agar Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda Kota Tangerang Selatan dapat berjalan, ini semua agar tidak ada tumpang tindih tugas dan fungsi dari masing-masing stakeholder sehingga tugas pokok dan fungsi dari tiap pihak yang terkait harus sudah memahami.

Untuk mencapai koordinasi yang baik, pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan berupaya melakukan koordinasi. Sesuai dengan pernyataan **Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I3)** berikut:

“Keberhasilan dalam Kerjasama akan tercapai ketika pelaksanaannya dilakukan dengan baik.” (Wawancara dengan Bapak Hadi Luthfie pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.40 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang).

Analisis dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan:

Koordinasi merupakan mekanisme yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, semakin kecil kemungkinan terjadi kesalahan. Sebaliknya, jika koordinasi kurang baik, kemungkinan terjadi tumpang tindih tugas dan kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan menjadi lebih tinggi.

2. Pentingnya Koordinasi dalam Kebijakan Meningkatkan Literasi:

Dalam pelaksanaan Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda di Kota Tangerang Selatan, koordinasi dianggap memiliki peran yang penting dari setiap pihak yang terlibat. Hal ini dikarenakan kebijakan literasi melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pihak swasta, komunitas, dan masyarakat umum. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan tugas dan fungsi dari masing-masing stakeholder dapat dipahami dengan jelas dan tumpang tindih tugas dapat dihindari.

3. Upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam Koordinasi:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan menyadari pentingnya koordinasi dalam implementasi kebijakan literasi. Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I3) menekankan pentingnya kerjasama dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa dinas berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan kebijakan literasi.

Secara keseluruhan, hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa koordinasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda di Kota Tangerang Selatan. Koordinasi yang baik di antara berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pemerintah daerah, pihak swasta, komunitas, dan masyarakat umum, menjadi kunci untuk mencapai tujuan kebijakan dengan efektif dan efisien. Dengan adanya kerjasama yang baik, tumpang tindih tugas dapat dihindari, dan implementasi kebijakan literasi dapat berjalan dengan lebih lancar dan berhasil.

Lain halnya yaitu peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan terhadap kebijakan ini. Seperti pernyataan dari **Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I3)** sebagai berikut:

“Peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan adalah menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah, mempromosikan gemar membaca melalui perpustakaan, serta memastikan layanan perpustakaan merata di daerah sesuai dengan tupoksi.” (Wawancara dengan Bapak Hadi Luthfie pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.42 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Hal yang serupa disampaikan oleh **Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I2)** mengatakan bahwa peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan literasi ini:

“Peran kita adalah menanamkan cinta terhadap bahan bacaan pada generasi muda, dengan mengacu pada tupoksi yang telah diatur dalam peraturan daerah dan petunjuk dari pak Hadi.” (Wawancara dengan ibu Sadiyah pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.45 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I3) dan Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I2), dapat ditarik beberapa analisis mengenai peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan dalam implementasi Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda:

1. Penyelenggaraan dan Pengembangan Perpustakaan:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki peran utama dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah. Dengan menyediakan fasilitas perpustakaan yang baik dan lengkap, masyarakat, khususnya generasi muda, dapat memiliki akses mudah untuk membaca dan mengakses bahan bacaan yang berkualitas.

2. Menggalakkan Promosi Gemar Membaca:

Salah satu peran Dinas adalah menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan. Upaya promosi ini bertujuan untuk mendorong minat baca masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi. Dinas dapat mengadakan berbagai

kegiatan dan program promosi agar membaca menjadi kegiatan yang disukai dan dilakukan oleh masyarakat, terutama generasi muda.

3. Membantu Mengembangkan Layanan Perpustakaan di Daerah:

Dinas juga bertanggung jawab untuk membantu mengembangkan layanan perpustakaan secara merata di daerah. Hal ini berarti memastikan bahwa perpustakaan tidak hanya terpusat di satu lokasi tetapi juga tersedia di berbagai daerah, sehingga masyarakat dari berbagai wilayah dapat dengan mudah mengakses bahan bacaan dan manfaat dari layanan perpustakaan.

4. Menanamkan Cinta pada Bahan Bacaan:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan berusaha untuk menanamkan cinta dan minat pada bahan bacaan kepada generasi muda. Dengan menciptakan suasana yang menyenangkan dan menarik di perpustakaan, generasi muda akan lebih tertarik untuk membaca dan menjadikan membaca sebagai kebiasaan positif.

5. Mengacu pada Tupoksi:

Seluruh peran dan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan literasi ini didasarkan pada tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yang telah diatur dalam peraturan daerah. Ini menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan beroperasi sesuai dengan pedoman dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda. Melalui upaya penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan, promosi gemar membaca, pengembangan layanan perpustakaan yang merata, dan menanamkan cinta pada bahan bacaan, diharapkan literasi di kalangan generasi muda dapat meningkat. Selain itu, fokus pada

tupoksi menunjukkan bahwa Dinas beroperasi secara terarah dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya bagaimana hambatan yang terjadi dalam pengimplementasian kebijakan ini. Dapat dilihat dari pernyataan **Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran membaca (I3)** mengenai hambatan yang terjadi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan mengatakan bahwa:

“Hambatannya adalah kurangnya keinginan kuat dari masyarakat khususnya generasi muda untuk datang ke perpustakaan. Namun, acara Rabukustik setiap Rabu memberikan hiburan menarik. Bantuan guru diperlukan untuk memotivasi siswa gemar membaca. Kami menyarankan program kunjungan ke perpustakaan untuk mendorong siswa membaca lebih banyak.” (Wawancara dengan Bapak Hadi Luthfie pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.45 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Hal serupa di tambahkan oleh **Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I2)** mengatakan bahwa hambatan yang terjadi dalam pengimplementasian kebijakan ini sebagai berikut:

“Upaya kita adalah menanamkan cinta bacaan pada generasi muda, membuat mereka jatuh cinta pada buku. Selain bermain, kami mengajak pelajar membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Banyak bahan bacaan diterima, termasuk cerita, novel, fiksi, dan komik, memberikan hiburan dan ilmu yang bermanfaat.” (Wawancara dengan Ibu Sadiyah pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.50 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I3) dan Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I2), terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam pengimplementasian Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda di Kota Tangerang Selatan:

1. Minimnya Keinginan Masyarakat dan Generasi Muda untuk Berkunjung ke Perpustakaan:

Salah satu hambatan yang dihadapi adalah minimnya keinginan dari masyarakat, terutama generasi muda, untuk datang ke perpustakaan. Beberapa generasi muda cenderung lebih tertarik bermain dengan gadget atau ponsel pintar daripada mengunjungi perpustakaan. Untuk mengatasi hambatan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu menghadirkan kegiatan atau acara menarik seperti "rabukustik" yang menggabungkan hiburan dengan membaca buku, sehingga masyarakat merasa tertarik untuk datang ke perpustakaan.

2. Dukungan dari Guru-Guru dalam Memotivasi Siswa untuk Membaca:

Hambatan lainnya adalah kurangnya dukungan dari guru-guru dalam memotivasi siswa untuk membaca. Guru-guru perlu berperan aktif dalam memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa untuk lebih gemar membaca daripada bermain dengan ponsel atau gadget. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat bekerja sama dengan sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan yang mendorong siswa untuk datang ke perpustakaan dan membaca buku.

3. Waktu yang Terbatas untuk Membaca:

Terbatasnya waktu yang diberikan untuk membaca juga menjadi hambatan. Generasi muda seringkali hanya membaca sebentar dan kemudian kembali bermain. Salah satu solusi yang diusulkan adalah memberikan waktu khusus sebelum kegiatan pembelajaran dimulai di sekolah untuk membaca buku. Ini dapat menjadi momen yang bermanfaat untuk membentuk kebiasaan membaca pada generasi muda.

4. Minimnya Bahan Bacaan yang Tersedia:

Hambatan lain adalah minimnya bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan atau TBM (Taman Baca Masyarakat). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu bekerja keras untuk menyediakan beragam bahan bacaan yang menarik dan sesuai dengan minat generasi muda. Dengan menyediakan bahan bacaan yang menarik, diharapkan generasi muda akan lebih tertarik untuk membaca dan datang ke perpustakaan.

5. Kesadaran tentang Pentingnya Membaca:

Salah satu hambatan mendasar adalah rendahnya kesadaran tentang pentingnya membaca. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu terus melakukan upaya penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat dan generasi muda mengenai manfaat membaca, bahwa membaca bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai hiburan dan sumber ilmu pengetahuan.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu melakukan upaya sosialisasi yang lebih intensif, bekerja sama dengan pihak sekolah dan komunitas, serta terus berinovasi dalam menyajikan kegiatan dan bahan bacaan yang menarik. Selain itu, pendekatan yang menyenangkan dan memberikan penghargaan atas kegiatan membaca dapat membantu meningkatkan minat baca generasi muda di Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan pada 11 juli 2023 yang dilakukan terkait komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dapat dilihat berdasarkan pengamatan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan ini setiap tahunnya telah melakukan Kerjasama dengan para stakeholder lainnya untuk melakukan sosialisasi secara merata keseluruh wilayah Tangerang selatan. Sosialisasi yang dilakukan ini berupa perpustakaan keliling, dan menyediakan sarana dan prasaran yang memadai. Serta proses pelaksanaan dari sosialisasi ini sudah berjalan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yang memiliki peran untuk meningkatkan literasi generasi muda.

Dari hasil analisis di atas, terlihat bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi generasi muda di wilayahnya. Sosialisasi yang merata, berbagai metode sosialisasi, pembinaan dan ajakan untuk membaca, serta koordinasi dengan pihak sekolah adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan kebijakan literasi. Namun,

terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti minimnya keinginan masyarakat untuk datang ke perpustakaan, kurangnya dukungan dari guru-guru, minimnya bahan bacaan yang tersedia, dan rendahnya kesadaran tentang pentingnya membaca.

Dalam menghadapi hambatan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu terus berinovasi dalam menyajikan kegiatan dan bahan bacaan yang menarik bagi generasi muda. Kerjasama dengan pihak sekolah dan komunitas, serta pemanfaatan teknologi digital, dapat membantu meningkatkan minat baca masyarakat. Selain itu, upaya penyuluhan dan edukasi terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya literasi dan membaca. Dengan terus berupaya mengatasi hambatan-hambatan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi public dalam prespektif yang ditawarkan oleh Van Metter Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public yang telah ditetapkan. Lingkungan social, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Jika dilihat dari lingkungan social dalam implementasi Kebijakan Meningkatkan Literasi di Kota Tangerang Selatan secara umumnya sudah kondusif. Oleh karena itu untuk meningkatkan literasi pada masyarakat umum khususnya generasi muda, pentingnya Dinas ini dalam mebentuk pola pikir dan perilaku masyarakat umum khususnya generasi muda terhadap Pendidikan dan literasi karena kebiasaan membaca dan minat terhadap literasi itu sering dipengaruhi oleh budaya keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Maka dari itu bagaimana respon dari masyarakat khususnya generasi muda terhadap

kebijakan ini. Seperti pernyataan **Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I2)** mengatakan bahwa:

“Respon masyarakat sangat antusias terhadap perpustakaan keliling ini. Setiap kali datang, mereka menyambut dengan baik dan memberikan sambutan hangat. Masyarakat senang dengan kehadiran perpustakaan keliling dan menunjukkan minat membaca yang tinggi, terlihat dari banyaknya anak-anak yang mengajak orang tua mereka ke lokasi perpustakaan untuk membaca.” (Wawancara dengan Ibu Sadiyah pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.54 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Selain dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sadiyah ada juga respon dari masyarakat terkait tentang kebijakan meningkatkan literasi ini yang disampaikan oleh salah satu pengunjung perpustakaan sebagai berikut:

“Saya merasa antusias dan mendukung pengembangan perpustakaan dalam meningkatkan literasi serta aktif menggunakan fasilitas yang ditingkatkan. Namun, ada generasi muda yang kurang tertarik karena kesadaran tentang manfaat literasi terbatas, sehingga Dinas Perpustakaan dan stakeholder perlu memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi.” (Wawancara dengan Dewi pada hari Rabu 12 Juli 2023 pukul 09.00 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Sama halnya dengan pernyataan masyarakat lainnya yang merupakan pengunjung di Perpustakaan. Beliau mengatakan bahwa:

“Dukungan kebijakan ini, terutama dari generasi muda, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan perpustakaan dan aksesibilitasnya. Faktor-faktor seperti lokasi yang mudah dijangkau, fasilitas lengkap, koleksi buku yang relevan dan terbaru, serta ketersediaan akses internet dan ruang baca, menjadi motivasi bagi generasi muda untuk memanfaatkannya.” (Wawancara dengan Ibu Amelia pada hari Rabu 12 Juli 2023 pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Begitu pun yang dikatakan salah satu masyarakat lain mengenai kebijakan ini bahwa:

“Perpustakaan harus menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan menarik, seperti diskusi buku, pelatihan keterampilan, seminar, dan kegiatan kreatif lainnya untuk menarik minat masyarakat umum,

terutama generasi muda, dalam mendukung kebijakan ini.” (Wawancara dengan Ibu Roro pada hari Rabu 12 Juli 2023 pukul 10.00 WIB di Villa dago Tol).

Hasil analisis dari respon masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap kebijakan meningkatkan literasi di Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

1. Lingkungan Sosial yang Kondusif:

Lingkungan sosial di Kota Tangerang Selatan dinilai kondusif dalam implementasi kebijakan meningkatkan literasi. Kondisi ini dapat menjadi faktor pendukung yang penting dalam upaya meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat, terutama generasi muda. Adanya antusiasme dan penerimaan baik dari masyarakat terhadap kehadiran Dinas Perpustakaan, termasuk perpustakaan keliling, menunjukkan adanya dukungan positif dari lingkungan sekitar dalam upaya meningkatkan literasi.

2. Peran Penting Dinas Perpustakaan:

Dinas Perpustakaan memiliki peran krusial dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pendidikan dan literasi. Kebiasaan membaca dan minat terhadap literasi seringkali dipengaruhi oleh budaya keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kehadiran Dinas Perpustakaan dengan program-program literasi dan fasilitas yang ditingkatkan menjadi penting untuk menciptakan lingkungan literasi yang positif.

3. Dukungan Antusias Masyarakat:

Secara umum, respon dari masyarakat, termasuk generasi muda, terhadap kebijakan meningkatkan literasi ini cukup positif. Masyarakat menunjukkan antusiasme dan dukungan terhadap pengembangan perpustakaan, termasuk partisipasi aktif dalam menggunakan fasilitas yang disediakan. Misalnya, kehadiran perpustakaan keliling di spot-spot olahraga pada hari Minggu mendapat respon antusias dari banyak anak yang bahkan mengajak orang tua mereka untuk membaca. Ini

menunjukkan bahwa program-program yang menarik dan terjangkau secara geografis dapat meningkatkan minat baca masyarakat.

4. Tantangan Kesadaran Literasi:

Meskipun mayoritas masyarakat menunjukkan antusiasme terhadap kebijakan meningkatkan literasi, terdapat sebagian generasi muda yang masih kurang tertarik. Tantangan utamanya adalah terbatasnya kesadaran mengenai manfaat dari literasi. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan upaya edukasi oleh Dinas Perpustakaan dan para stakeholder guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi dalam kehidupan mereka.

5. Faktor Pendukung Literasi:

Beberapa faktor yang dapat mendukung keberhasilan kebijakan meningkatkan literasi adalah ketersediaan perpustakaan yang mudah dijangkau, fasilitas yang lengkap dan relevan, koleksi buku yang up-to-date, serta adanya akses internet dan ruang baca yang nyaman. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan motivasi generasi muda untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana peningkatan literasi.

6. Program dan Kegiatan Menarik:

Masyarakat, khususnya generasi muda, menunjukkan minat dan partisipasi yang lebih tinggi dalam mendukung kebijakan ini jika diselenggarakan berbagai program dan kegiatan menarik di perpustakaan. Diskusi buku, pelatihan keterampilan, seminar, atau kegiatan kreatif lainnya menjadi cara efektif untuk menarik perhatian dan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan literasi.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil wawancara tersebut, respon dari masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap kebijakan meningkatkan literasi di Kota Tangerang Selatan cukup positif. Dukungan dari lingkungan sosial yang kondusif, peran penting Dinas Perpustakaan, dan upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran literasi menjadi kunci dalam mencapai tujuan meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat secara umum, terutama generasi muda. Selain

itu, menyediakan fasilitas dan program-program menarik di perpustakaan juga menjadi faktor penting untuk menciptakan lingkungan literasi yang aktif dan berdaya guna.

Selanjutnya bagaimana dukungan dari para elit politik dan tokoh masyarakat ini sangat penting dalam keberhasilan kebijakan ini. Seperti pernyataan **Kepala Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan (I₂)** mengatakan bahwa:

“Kami telah mendapatkan anggaran dari DPRD sebagai bukti dukungan.” (Wawancara dengan Ibu Sadiyah pada hari Selasa 11 Juli 2023 Pukul 10.55 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Selanjutnya hal serupa disampaikan oleh **Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I₃)** mengenai bagaimana dukungan dari elit politik dan tokoh masyarakat dalam kebijakan ini;

“Dukungannya mencakup alokasi anggaran dan sumberdaya serta memberikan motivasi untuk melaksanakan kebijakan dengan sukses.” (Wawancara dengan Bapak Hadi Luthfie pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 10.58 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan pernyataan tersebut tentang dukungan dari para elit politik dan tokoh masyarakat terhadap keberhasilan kebijakan meningkatkan literasi sebagai berikut:

1. Peran Elit Politik dalam Pengalokasian Anggaran:

Dukungan dari para elit politik, termasuk DPRD, dalam mengalokasikan anggaran untuk kebijakan meningkatkan literasi sangat penting dalam keberhasilan program ini. Anggaran yang diperoleh dapat digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan fasilitas perpustakaan, menyediakan koleksi buku yang relevan, serta mendukung program-program literasi lainnya. Dengan adanya dukungan anggaran dari pihak politik, Dinas Perpustakaan memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan program-program literasi secara efektif.

2. Dukungan Sumber Daya dan Motivasi:

Selain alokasi anggaran, dukungan dari elit politik juga mencakup pemenuhan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya ini bisa berupa personel yang kompeten, infrastruktur yang memadai, dan teknologi yang mendukung. Selain itu, motivasi semangat yang diberikan oleh elit politik dapat memberikan dorongan positif bagi para pelaksana kebijakan, seperti Dinas Perpustakaan dan stafnya, untuk mengimplementasikan program-program literasi dengan penuh dedikasi dan komitmen.

3. Pengaruh Kepemimpinan dan Otoritas:

Dukungan dari para elit politik juga mencakup pengaruh kepemimpinan dan otoritas mereka dalam membujuk masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung kebijakan literasi. Sebagai tokoh yang dihormati dan memiliki pengaruh, dukungan mereka dapat mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat serta menciptakan atmosfer positif terhadap program literasi yang diusulkan.

4. Sinergi dengan Tokoh Masyarakat:

Selain dukungan dari elit politik, dukungan dari tokoh masyarakat juga memegang peran penting dalam keberhasilan kebijakan literasi. Tokoh masyarakat seringkali memiliki kedekatan dan pengaruh yang kuat di kalangan masyarakat lokal. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, kebijakan literasi dapat lebih mudah diterima dan diadopsi oleh masyarakat secara luas.

5. Penguatan Keterlibatan Masyarakat:

Melalui dukungan elit politik dan tokoh masyarakat, program-program literasi dapat lebih efektif dalam membangun keterlibatan masyarakat. Dukungan ini dapat mencakup kampanye-kampanye sosial, kegiatan edukatif, dan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap literasi.

Berdasarkan hasil wawancara, dukungan dari para elit politik dan tokoh masyarakat sangat penting dalam keberhasilan kebijakan

meningkatkan literasi di Kota Tangerang Selatan. Dukungan ini mencakup alokasi anggaran, pemberian sumber daya, motivasi semangat, pengaruh kepemimpinan, serta sinergi dengan tokoh masyarakat untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam program-program literasi. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan kebijakan literasi dapat berjalan dengan lebih lancar dan mencapai tujuan peningkatan minat baca dan literasi masyarakat, khususnya generasi muda.

Kemudian terdapat dukungan dari lingkungan social dan ekonomi ini memiliki peran yang penting dalam program peningkatan literasi dikalangan masyarakat khususnya generasi muda dalam hal kemauan dan kemampuannya dalam meningkatkan literasi. Seperti pernyataan **Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemeran Membaca (I3)** mengatakan bahwa:

“Dukungan dari berbagai stakeholder, termasuk masyarakat dan sektor swasta, sangat mendukung pengembangan perpustakaan sesuai dengan Transformasi Perpustakaan Bersama Inklusi Sosial (TPBIS).” (Wawancara dengan Bapak Hadi Luthfie pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 11.00 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan pernyataan tersebut tentang dukungan dari lingkungan sosial dan ekonomi terhadap program peningkatan literasi di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, adalah sebagai berikut:

1. Peran Penting Dukungan Lingkungan Sosial:

Dukungan dari lingkungan sosial, termasuk masyarakat dan stakeholder terkait lainnya, memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan program peningkatan literasi. Dukungan dari masyarakat dapat mencakup partisipasi aktif dalam program-program literasi, seperti mengunjungi perpustakaan, ikut dalam kegiatan literasi, dan mendukung program-program kampanye literasi. Selain itu, dukungan

dari stakeholder seperti pihak swasta juga berperan dalam menyediakan sumber daya dan fasilitas yang mendukung program literasi.

2. Pengaruh Kemauan dan Kemampuan:

Dukungan dari lingkungan sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi kemauan dan kemampuan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam meningkatkan literasi. Ketika ada dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pihak swasta, masyarakat akan merasa didorong dan termotivasi untuk terlibat lebih aktif dalam kegiatan literasi. Selain itu, dukungan dari pihak swasta dan stakeholder lainnya juga dapat meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas literasi, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk membaca dan mengakses informasi.

3. Sinergi dengan Program TPBIS:

Program TPBIS (Taman Bacaan dan Perpustakaan di Bawah Pohon) merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan perpustakaan dan memperluas akses literasi di tengah masyarakat. Dukungan dari lingkungan sosial dan ekonomi, termasuk para stakeholder, terhadap program TPBIS menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya upaya untuk meningkatkan literasi. Sinergi dengan program ini dapat memperkuat efektivitas dan cakupan program peningkatan literasi.

4. Dukungan Berbagai Pihak:

Pernyataan dari Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca menunjukkan bahwa ada dukungan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga pihak swasta, dalam rangka pengembangan perpustakaan dan program-program literasi. Dukungan dari berbagai pihak ini mencerminkan komitmen kolektif untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Ketika berbagai pihak bekerja bersama-sama, dampak positif dari program peningkatan literasi dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan.

5. Dampak Positif pada Generasi Muda:

Dukungan dari lingkungan sosial dan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan literasi di kalangan generasi muda, dapat membawa dampak positif yang jauh lebih besar. Melalui dukungan dan partisipasi aktif, generasi muda akan memiliki akses lebih baik terhadap literasi dan akan lebih termotivasi untuk mengembangkan minat baca dan pemahaman yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara, mengenai dukungan dari lingkungan sosial dan ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam program peningkatan literasi di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Dukungan ini mencakup partisipasi aktif dari masyarakat, peran pihak swasta dan stakeholder lainnya dalam menyediakan fasilitas dan sumber daya, serta sinergi dengan program-program literasi seperti TPBIS. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan program peningkatan literasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan pada peningkatan literasi di masyarakat.

Pengaruh perkembangan minat baca di Kota Tangerang Selatan setelah implementasi kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan dalam Peraturan Daerah No.2 Tahun 2016 memiliki kemungkinan besar akan menunjukkan perbaikan yang signifikan. Seperti pernyataan yang dikatakan oleh **Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan (I₂)** Mengatakan bahwa:

“Anak-anak kecil menyadari pentingnya membaca, terjadi memberi pengaruh besar. Kegiatan MCKIDS di perpustakaan, diikuti 50 anak Pra-Sekolah membantu meningkatkan minat membaca. Perpustakaan juga mengadakan pelatihan barista dan kopiliterasi untuk generasi muda di Tangerang Selatan yang ingin bekerja.” (Wawancara dengan Ibu Sadiyah pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 11.10 WIB di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Sama halnya dengan pernyataan **Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I₃)** mengatakan bahwa:

“Kesadaran dan upaya membangkitkan minat membaca penting bagi generasi muda, mengacu pada amanat perpustakaan dalam UUD "mencerdaskan kehidupan bangsa." Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang di genjarkan oleh Presiden Jokowi berdampak besar pada lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Pelatihan barista dan kegiatan berliterasi lainnya memberikan dampak positif pada generasi muda. (Wawancara dengan Bapak Hadi Luthfie pada hari Selasa 11 Juli 2023 pukul 11.15 WIB di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan).

Berdasarkan pernyataan tersebut, tentang pengaruh perkembangan minat baca di Kota Tangerang Selatan setelah implementasi kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan dalam Peraturan Daerah No.2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Positif Implementasi Kebijakan:

Implementasi kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Kota Tangerang Selatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No.2 Tahun 2016, berdampak positif terhadap perkembangan minat baca di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan (I2) menyatakan bahwa anak-anak kecil sudah mulai memiliki kesadaran tentang pentingnya membaca dan mereka dengan sukarela datang ke perpustakaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah berhasil menciptakan lingkungan literasi yang kondusif dan menarik bagi generasi muda.

2. Kesadaran dan Kegiatan di Perpustakaan:

Dengan adanya kebijakan ini, kesadaran tentang pentingnya membaca semakin meningkat di kalangan generasi muda. Kegiatan-kegiatan seperti kegiatan *MCKIDS* untuk anak usia pra-sekolah menunjukkan adanya upaya aktif dalam mengajak generasi muda untuk gemar membaca sejak dini. Selain itu, kegiatan-kegiatan lain seperti pelatihan barista dan pelatihan kopiliterasi juga menunjukkan bagaimana perpustakaan dapat berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat melalui literasi.

3. Menerapkan Gemar Membaca:

Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I3) menyatakan bahwa perpustakaan berperan dalam menyadarkan masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya gemar membaca. Kegiatan-kegiatan dan program-program yang diselenggarakan oleh perpustakaan, termasuk TPBIS, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berliterasi dan memberdayakan generasi muda agar menjadi sejahtera.

4. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa:

Pengaruh implementasi kebijakan ini sesuai dengan amanat dari UUD yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa" melalui sarana membaca. Dengan meningkatkan minat baca dan literasi di kalangan generasi muda, kebijakan ini berkontribusi dalam menciptakan generasi yang lebih terdidik, kreatif, dan berdaya saing.

5. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial:

Peran penting perpustakaan dalam transformasi berbasis inklusi sosial (TPBIS) juga turut memberikan pengaruh positif pada masyarakat. Kegiatan-kegiatan seperti pelatihan barista dan lainnya, yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan minat masyarakat, dapat meningkatkan partisipasi dan kesempatan masyarakat dalam mengakses ilmu pengetahuan dan meningkatkan keterampilan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, implementasi kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Kota Tangerang Selatan memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan minat baca dan literasi di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Dukungan dari Dinas Perpustakaan dalam menyelenggarakan kegiatan dan program-program yang menarik, serta kesadaran dari masyarakat dan para stakeholder, menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan literasi yang kondusif dan mendukung perkembangan minat baca di daerah tersebut.

Hasil observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan pada 11 Juli 2023 menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Kota Tangerang Selatan memiliki dampak positif terhadap perkembangan minat baca di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Beberapa poin kunci yang dapat diambil dari analisis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Sosial yang Kondusif:

Dukungan dan antusiasme dari masyarakat, termasuk generasi muda, terhadap kehadiran perpustakaan dan program-program literasi menunjukkan bahwa lingkungan sosial di Kota Tangerang Selatan dinilai kondusif. Hal ini menjadi faktor pendukung penting dalam meningkatkan minat baca dan literasi di daerah tersebut.

2. Peran Penting Dinas Perpustakaan:

Dinas Perpustakaan memiliki peran yang penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat terkait dengan pendidikan dan literasi. Kegiatan-kegiatan seperti MCKIDS, pelatihan barista, dan pelatihan kopiliterasi menunjukkan komitmen Dinas Perpustakaan dalam menciptakan lingkungan literasi yang aktif dan menarik bagi generasi muda.

3. Tantangan Kesadaran Literasi:

Meskipun mayoritas masyarakat menunjukkan dukungan dan antusiasme terhadap kebijakan literasi, masih terdapat sebagian generasi muda yang kurang tertarik. Tantangan utamanya adalah terbatasnya kesadaran mengenai manfaat dari literasi. Oleh karena itu, edukasi perlu menjadi fokus dalam upaya meningkatkan kesadaran dan minat baca di kalangan generasi muda.

4. Faktor Pendukung Literasi:

Adanya fasilitas perpustakaan yang mudah dijangkau, koleksi buku yang relevan dan up-to-date, serta adanya akses internet dan ruang baca yang nyaman menjadi faktor pendukung yang penting dalam meningkatkan minat baca dan literasi di masyarakat.

5. Program dan Kegiatan Menarik:

Kegiatan-kegiatan seperti diskusi buku, pelatihan keterampilan, seminar, dan kegiatan kreatif lainnya menjadi cara efektif untuk menarik perhatian dan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam upaya meningkatkan literasi.

Selain itu, menyoroti pentingnya dukungan dari para elit politik dan tokoh masyarakat dalam keberhasilan kebijakan meningkatkan literasi. Dukungan dari para elit politik dalam pengalokasian anggaran serta dukungan sumber daya dan motivasi menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan literasi yang efektif. Selain itu, sinergi dengan tokoh masyarakat juga penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program literasi.

Dukungan dari lingkungan sosial dan ekonomi juga memiliki peran penting dalam program peningkatan literasi di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Dukungan dari masyarakat, pihak swasta, dan stakeholder lainnya mencerminkan komitmen kolektif untuk meningkatkan literasi dan memberdayakan masyarakat melalui literasi.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan meningkatkan literasi di Kota Tangerang Selatan berpotensi memberikan perbaikan yang signifikan dalam minat baca dan literasi masyarakat, terutama generasi muda. Dukungan dari lingkungan sosial, elit politik, dan tokoh masyarakat menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan literasi yang kondusif dan berdaya guna.